



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBERDAYA,
DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI PADA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TASIKMALAYA DAN CIANJUR**

TESIS

WINDA PARAMITA

0906589394

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS FAKTOR KOMUNIKASI, SUMBERDAYA,
DISPOSISI DAN STRUKTUR BIROKRASI PADA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG PENDIDIKAN DI
KABUPATEN TASIKMALAYA DAN CIANJUR**

TESIS

WINDA PARAMITA

0906589394

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan benar.

Nama : Winda Paramita
NPM : 0906589394


Tanda Tangan :
Tanggal : Juli 2012

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Winda Paramita

NPM : 0906589394

Judul Tesis : Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur.

Telah disetujui,

Pembimbing



(Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si)

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Winda Paramita

NPM : 0906589394

Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.

Judul Tesis : Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Teguh Kurniawan, M.Sc

Pembimbing : Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si

Penguji : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc.,Sc.

Sekretaris Sidang: Drs. Heri Fathurahman, M.Si



(*Teguh Kurniawan*)
(*Amy Y.S. Rahayu*)
(*Roy V. Salomo*)
(*Heri Fathurahman*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Paramita
NPM : 0906589394
Program Studi : Ilmu Administrasi
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya berjudul:

“Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan Di Kabupaten Tasikmalaya Dan Cianjur”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama masih tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal :
Yang menyatakan



(Winda Paramita)

ABSTRAK

Nama : Winda Paramita
Program Studi : Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan.
Judul Tesis : Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur.

Penelitian ini mengenai Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan makna suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variabelnya, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (*mix*) antara kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehinggadapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi

Kata kunci : Bencana Alam, Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan, Kebijakan publik.

ABSTRACT

Name : Winda Paramita
Program of Study : Specificity of Administrative Science and Education
Policy
Thesis Title : Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition
and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster
Management Policies in Education in the District
Tasikmalaya and Cianjur.

The research is about Factor Analysis of Communication, Resource, Disposition and Bureaucratic Structure in Implementation of Disaster Management Policies in Education. The research was conducted in district Tasikmalaya dan Cianjur, West Java. The research examines about the analysis of the implementation of disaster management policy in education in depth and detail. Policy implementation model used in analyzing the factors of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the implementation of disaster management policy in education is the model proposed by George C. Edward III. The model explains that there are four important variables in achieving the success of implementation, they are: communication, resource, disposition and bureaucratic structure. Since the research questions the meaning of an object in depth and complete and accurate description of each variable, the method used in this study is combination of quantitative and qualitative.

The result of the research shows that based on above explanation can be concluded that all the aspects or dimensions, which are communication, resource, disposition and bureaucratic structure are still in medium category, which means the implementations of disaster management in education needs to be improved for more leverage and more effectively, so that it can generate the community's self-awareness in disaster management in education. Thereby, reducing disaster risk will be addressed more easily.

Key words: disaster, disaster management in education, public policy.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan HidayahNya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, baik masa perkuliahan, saat penelitian dan saat penyusunan tesis ini tidak mungkin dapat terselesaikan hanya oleh diri sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
2. Teguh Kurniawan, M.Sc, Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc dan Drs. Heri Fathurahman, M.Si. selaku tim penguji.
3. Dr. Amy Y.S. Rahayu, M.Si, selaku pembimbing yang telah memberi banyak masukan, saran dan dorongan motivasi sehingga selesainya tesis ini.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur yang telah membantu dan mendukung serta mengizinkan penulis melakukan penelitian di sekolah ini.
5. Suamiku dan anak-anakku tercinta : terima kasih untuk semua dukungan dan cinta tulus kalian.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Dengan penuh kerendahan hati, selanjutnya dengan rasa hormat tesis ini penulis sajikan dan berharap agar dapat menambah wawasan mengenai penanggulangan bencana bidang pendidikan serta memberikan manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Juli 2012

Penulis,



Winda Paramita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	10
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
2.2 Teori Kebijakan Publik	10
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.2.2 Tujuan Kebijakan Publik	12
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.3 Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.....	20
2.4 Bencana Alam	21
2.5 Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	48
BAB IV PROFIL PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG	54

	PENDIDIKAN	
4.1	Program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan...	55
4.2	Profil Provinsi Jawa Barat.....	64
4.3	Profil Kabupaten Tasikmalaya.....	67
4.4	Profil Kabupaten Cianjur.....	72
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	79
5.1	Deskripsi dan Analisis Data.....	79
5.2	Deskripsi dan Analisis Data Komunikasi	80
5.3	Deskripsi dan Analisis Data Sumberdaya	94
5.4	Deskripsi dan Analisis Data Disposisi	103
5.5	Deskripsi dan Analisis Data Struktur Birokrasi.....	110
BAB VI	SIMPULAN DAN SARAN	118
6.1	Simpulan	118
6.2	Saran	119
REFERENSI	120

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Gambaran Kondisi Sekolah Akibat Gempa di Tasikmalaya.....	4
Tabel 2 : Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.....	37
Tabel 3 : Operasional Faktor Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.....	44
Tabel 4 : Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan.....	46
Tabel 5 : Kriteria Penilaian KepmenPAN Nomor 25 tahun 2004.....	52
Tabel 6 : Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat.....	81
Tabel 7 : Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah.....	82
Tabel 8 : Pemerintah mengadakan Pelatihan.....	83
Tabel 9 : Penggunaan Bahasa Narasumber.....	85
Tabel 10 : Sosialisasi Secara Langsung.....	86
Tabel 11 : Bentuk Sosialisasi Tak Langsung.....	87
Tabel 12 : Pedoman yang Di gunakan.....	88
Tabel 13 : Kejelasan Isi Pedoman.....	89
Tabel 14 : Tingkat Pemahaman Guru.....	90
Tabel 15 : Jumlah Tenaga dalam Program.....	94
Tabel 16 : Keterlibatan Guru.....	95
Tabel 17 : Ketersediaan Fasilitas.....	96
Tabel 18 : Ketersediaan Bahan Pendukung.....	97
Tabel 19 : Kemudahan Pengguna Fasilitas.....	98
Tabel 20 : Keterpeliharaan Fasilitas.....	99
Tabel 21 : Bantuan Dana dari Pemerintah.....	100
Tabel 22 : Ketersediaan Dana.....	101

Tabel 23 : Analisis Dimensi Sumberdaya.....	102
Tabel 24 : Usaha Guru.....	103
Tabel 25 : Pemberian Insentif.....	104
Tabel 26 : Pemberian Insentif setelah Melaksanakan Tugas.....	105
Tabel 27 : Nilai Insentif.....	105
Tabel 28 : Analisis Dimensi Disposisi.....	107
Tabel 29 : Ketersediaan SOP.....	110
Tabel 30 : Kejelasan SOP.....	111
Tabel 31 : Ketersedian Tim Khusus.....	112
Tabel 32 : Ketersedian Job Description.....	113
Tabel 33 : Kejelasan Job Description.....	114
Tabel 34 : Pertemuan dengan Pemerintah.....	115
Tabel 35 : Analisis Dimensi Struktur Birokrasi.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, membahas tentang masalah-masalah yang melatarbelakangi penelitian, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Wilayah Indonesia adalah wilayah yang rentan terjadi bencana, baik bencana berskala kecil, lokal, besar, bahkan berskala internasional, karena Indonesia memiliki geografis dan geologis yang potensial terkena bencana alam, terutama bencana geologi dan dijuluki sebagai negeri cincin api. Letak wilayah Indonesia berada pada tiga lempeng tektonik didunia, yaitu lempeng Australia di selatan, lempeng Euro-Asia di barat dan lempeng Samudra pasifik di timur, yang dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Sebagai contoh bencana alam yang terjadi di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2004 berupa gempa bumi dan tsunami, berlanjut gempa bumi di Pulau Nias, Pertikaian bernuansa SARA di Poso dan Ambon, Gempa Nabire dan Alor, Gempa Bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gempa Bumi dan tsunami di Pangandaran dan Tasikmalaya Selatan, longsor di Manggarai NTT, Gempa bumi di Sumatera Barat, Gempa Bumi di Bengkulu, dan Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta Gempa Bumi Tasikmalaya Jawa Barat, dan baru-baru ini meletusnya gunung merapi di Yogyakarta yang bersamaan dengan gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah di Pulau Jawa yang rawan bencana. Berbagai potensi bencana alam seperti gempa, gelombang tsunami, gerakan tanah, banjir dan kekeringan hampir dapat dipastikan selalu mengancam sebagian besar wilayah di Jawa Barat.

Bencana memiliki dampak terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Bukan saja kerusakan infrastruktur dan kehilangan harta benda tetapi telah merenggut korban jiwa yang dapat berakibat kepada terganggunya psikologis

Universitas Indonesia

bagi korban-korban yang selamat. Hal tersebut akan berpengaruh kepada sarana dan prasarana yang ada diberbagai sektor dan dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Dan salah satu sektor yang terpenting adalah sektor pendidikan.

Di sektor pendidikan, kerusakan dan kehilangan tersebut akan berpengaruh terhadap fasilitas fisik (sarana dan prasarana) serta keberadaan siswa dan guru. Masalah tersebut akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dapat berakibat fatal pada kelangsungan sebuah proses pendidikan. Akibat lain yang ditimbulkan dari bencana adalah gangguan psikologis guru dan siswa, dalam jangka panjang akan berdampak buruk terhadap sikap dan mental mereka dimasa yang akan datang.

Kerusakan gedung-gedung sekolah kerap terjadi pasca bencana yang terjadi di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan belajar mengajar untuk beberapa waktu. Penyebab utama kerusakan gedung-gedung sekolah tersebut adalah rendahnya mutu bahan dan pengerjaan serta pelaksanaan detail-detail sambungan, penulangan yang tidak sesuai dengan kaidah konstruksi. Untuk itu ada upaya-upaya yang dilakukan agar dapat menekan dampak bencana melalui pembuatan gedung-gedung sekolah yang sesuai dengan kaidah konstruksi bangunan tahan gempa yang selanjutnya disebut dengan Kegiatan Mitigasi Bencana. (Ditjen Mandikdasmen, Kemendiknas, 2010)

Berdasarkan hal tersebut diatas pemberian subsidi sarana dan prasarana untuk rehabilitasi bangunan sekolah yang terkena bencana melalui Pemerintah Pusat, diharapkan dapat menghasilkan gedung-gedung sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tahan gempa, sebagai upaya mitigasi fisik struktural dapat terlaksana dengan baik, dan hasil kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksi gedung sekolah dapat dioperasikan/dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai optimalisasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan rehabilitasi gedung sekolah akibat

bencana, rehabilitasi gedung sekolah sebagai upaya mitigasi fisik struktural, serta memelihara hasil kegiatan rehabilitasi tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang - undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka undang-undang ini diharapkan dapat mendorong sinergi dari berbagai pihak didalam usaha penanggulangan bencana di Indonesia. Serta didalam bidang pendidikan didukung oleh GBHN 1999, yaitu untuk memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Pembangunan pendidikan nasional ke depan didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal.

Permasalahan dalam kualitas pendidikan terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Mutu keluaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan yang secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatana mutu pendidikan meliputi : (a) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas dan kualitas, maupun kesejahteraan pendidik yang belum memadai (b) prasarana dan sarana belajar yang belum tersedia dan belum didayagunakan secara optimal (c) biaya pendidikan yang belum memadai untuk menunjang mutu pembelajaran (d) proses pembelajaran yang belum efisien dan efektif (Muhamad Ali, 2006)

Dari aspek fisik sarana-prasarana penunjang pendidikan kondisinya belum sepenuhnya memadai. Selain hal tersebut juga banyak ruang belajar dan sarana belajar lain seperti laboratorium, sarana olahraga yang rusak. Selain itu, Jawa Barat pun rentan terhadap gempa bumi. Misalnya, gempa bumi terjadi pada tahun 2009 dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat gempa berada 142 KM Barat Daya Tasikmalaya, yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan, gambaran kondisi tersebut adalah sebagai berikut dari sekitar 2504 ruang belajar (lokal) terdapat sekitar 1710 ruang belajar SD/MI, Pada jenjang SMP terdapat 625 ruang belajar SMP/MTs yang

Universitas Indonesia

juga mengalami rusak, dan pada jenjang SMA terdapat sekitar 169 ruang belajar yang mengalami kerusakan (Depdiknas, 2009).

Tabel 1

Gambaran kondisi sekolah akibat gempa di Tasikmalaya

Jenjang Pendidikan	Jumlah sekolah Rusak Ringan/Rusak Berat
SD/MI	1710 ruang belajar
SMP/MTS	625 ruang belajar
SM	169 ruang belajar

Sumber : Depdiknas 2009

Gempa tektonik tersebut terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa. Total puluhan ribu bangunan rumah maupun gedung perkantoran di Indramayu, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan mengalami kerusakan parah. Di Cianjur terjadi tanah longsor yang menyebabkan 11 rumah tertimbun. Banyaknya gunung berapi di Jawa Barat, seperti gunung: Ciremai, Galunggung, Gede, Guntur, Papandayan, Salak, dan Tangkuban Perahu yang sewaktu-waktu aktif dan dapat memuntahkan materialnya ke daerah-daerah sekitarnya serta menimbulkan bencana bagi masyarakatnya (Depdiknas, 2010).

Tak pelak lagi bidang pendidikan pun terkena dampak bencana alam ini. Ketika terjadi bencana alam, anak-anaklah yang paling rentan terkena dampaknya. Terutama sekali jika pada saat kejadian para peserta didik sedang belajar di lingkungan sekolah. antara lain rusaknya fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan sekolah, peralatan belajar, dan sebagainya, sehingga berpengaruh sekali terhadap terbatasnya pelayanan pembelajaran kepada peserta didik yang diberikan oleh sekolah.

Dari kondisi tersebut, selain akan berpengaruh pada ketidaklayakan, ketidak nyamanan pada proses belajar mengajar, juga akan berdampak pada keengganan dari orangtua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tersebut. Selain itu, sebagian besar wilayah Indonesia rawan terhadap bencana. Hampir pada setiap kejadian bencana terdapat sekolah yang mengalami

Universitas Indonesia

kerusakan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Bencana juga sering menimbulkan korban jiwa, termasuk siswa dan guru sekolah. Siswa dan guru yang mengalami bencana pada umumnya mengalami trauma psikologis akibat bencana tersebut, untuk itu perlu dilakukan trauma konseling untuk mengembalikan keadaan psikologis.

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 94%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program antara lain penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup penambahan sarana untuk pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak; dalam hal ini Pemerintah memberikan perhatian yang serius terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah bencana alam, kerusakan, perbatasan negara dan daerah lain yang sekolahnya memerlukan rehabilitasi.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah Pengurangan risiko bencana dan pemuatannya dengan program pembangunan. Sedangkan Pengurangan risiko bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 huruf b undang-undang yang sama, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana yang meliputi: pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Kegiatan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan ini juga mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 pada Bagian IV Bab 27 huruf D Program-Program Pembangunan Nomor 21, menyatakan :

“Penyediaan Sarana dan Prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidikan dan tenaga kpendidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah pedesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai pembangunan/rekonstruksi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada di wilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan”.

Rehabilitasi gedung sekolah yang memanfaatkan dana subsidi sarana dan prasarana pendidikan harus dilaksanakan dengan cara swakelola dan memberdayakan masyarakat sekitar sekolah. Keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan pemeliharaan hasil kegiatan. Untuk menjamin kualitas bangunan, pelaksanaan rehabilitasi tersebut dibantu oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang Keahlian Teknik Bangunan sebagai Tim Perencana dan Pengawas yang sudah mendapatkan pelatihan sebagai Tim Perencana dan Pengawas. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan rehab ringan dan sedang adalah 90 hari kalender dan

Universitas Indonesia

untuk rehab berat 150 hari kalender terhitung sejak diterimanya dana oleh pihak sekolah/komite sekolah (Ditjen Mandikdasmen Kemendiknas, 2010).

Kerusakan-kerusakan gedung sekolah yang terjadi pasca gempa bukan saja diakibatkan oleh bencana semata, tetapi karena rendahnya mutu bahan, dan pengerjaan yang tidak sesuai dengan kaidah konstruksi. Hal tersebut di akibatkan disiplin membangun yang sudah sangat merosot sehingga tidak lagi dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang semestinya. Sebagian besar kerusakan dan robohnya gedung sekolah pada gempa bumi yang lalu di Indonesia tidak disebabkan oleh kesalahan perencanaan, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kendali mutu yang lemah tidak adanya pemeliharaan yang memadai. Turunnya disiplin membangun terutama disebabkan karena ketidaktahuan para pelaksana di lapangan tentang cara membangun yang benar. Hal ini karena terdapat jurang pemisah antara pengetahuan para pakar di kota-kota besar dengan para tukang kayu, tukang batu dan tukang beton sebagai pelaksana pembangunan. (Ditjen Mandikdasmen, Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2010)

Implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyahkan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan akan berhasil atau tidak dipengaruhi oleh banyak factor, menurut Edward (2003:11) terdapat empat variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan secara objektif. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah sekolah-sekolah yang mendapatkan subsidi

penanggulangan bencana dibidang pendidikan, yang terkena dampak langsung bencana alam di Provinsi Jawa Barat, berada didekat Ibu Kota Negara Republik Indonesia sebagai barometer nasional bagi mutu pendidikan di Indonesia dengan indikator adanya sumber daya pendidikan dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Maka peneliti tertarik untuk meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: bagaimana Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan untuk : Menganalisis Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Akademik
Penelitian ini menambah kekayaan kajian kebijakan terutama berkaitan dengan kajian Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
- b. Secara praktis, bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan kebijakan berikutnya.

Universitas Indonesia

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kondisi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah sehingga dapat meningkatkan semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pendidikan khususnya dalam hal peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan.

1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan. Pada Bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan Literatur. Berisikan pembahasan mengenai teori teori tentang implementasi kebijakan: pengertian implementasi kebijakan, model pendekatan implementasi kebijakan.
- BAB III : Metode Penelitian. Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, tipe/jenis penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data serta teknik pengolahan dan analisis data dan lokasi penelitian ini dilaksanakan.
- BAB IV : Pada bab ini, dibahas mengenai gambaran penyelenggaraan program penanggulangan bencana bidang pendidikan.
- BAB V : Pada bab ini membahas hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.
- BAB VI : Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran setelah didapatnya hasil dari penelitian sehingga menghasilkan saran-saran untuk kemajuan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

Pada Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang melandasi analisis penelitian subsidi pembangunan pendidikan di daerah bencana alam dan teori lainnya yang terkait dengan materi penelitian ini.

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Irene Astuti dan Sudaryono tentang peran sekolah dalam pembelajaran mitigasi bencana. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di Solo. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pemahaman responsive siswa terhadap mitigasi bencana gempa dan tsunami lebih rendah di banding dengan pemahaman dan responsive mahasiswa terhadap bencana banjir dan gunung meletus.

Saru Arifin meneliti tentang model kebijakan mitigasi bencana alam bagi difabel (Studi kasus di Bantul, Yogyakarta), bertujuan untuk mengetahui pola kebijakan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana alam bagi difabel. Dengan metode deskriptif kualitatif menyimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai komitmen program secara khusus dilakukan untuk merehabilitasi secara ekonomi maupun social bagi penyandang difabel.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Berbagai teori tentang Kebijakan Publik banyak sekali yang dikembangkan oleh para peneliti, tetapi teori-teori tersebut tetap mengarah kepada satu tujuan, yaitu agar program-program pemerintah dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung

Universitas Indonesia

jawab melayani kepentingan umum. Batasan atau definisi mengenai kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Menurut Thomas R Dye (1992:2) kebijakan publik diartikan sebagai “*whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti yang dikemukakan oleh Monahan dan Hengs seperti yang dikutip Syafarudin (2008) kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan baga sehingga organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal ini mereka berusaha mengejar tujuannya.

Menurut Kartasasmita (1997:142) kebijakan publik adalah sebagai serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dan hal ini adalah upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhi, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Anderson mendefinisikannya sebagai *relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Riant Nugroho, 2009: 83) definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan dilakukan oleh para pelakunya untuk memecahkan masalah. Senada dengan definisi ini Friedrick dikutip (Ali Imron, 2008) yang menerangkan batasan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan (ancaman dan peluang) pelaksanaan usulan tersebut dalam mencapai tujuan. Menurut Leslie A. Pal (1987:4) kebijakan publik adalah: “*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*”. Dwiyanto Indiahono (2009, 18) mendefinisikan kebijakan public sebagai segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah public yang dihadapi. Perkembangan konsep kebijakan mengarahkan bahwa pada dasarnya

Universitas Indonesia

sebuah kebijakan publik terlaksana dalam-dan karena itu bisa dinilai-dari tiga hal, yaitu : proses pembuatan/penyusunan kebijakan, substansi kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.

Pengertian-pengertian tersebut kiranya jelas, bahwa untuk memberikan batasan mengenai kebijakan publik dapat menggunakan berbagai sudut pandang, dari sudut proses ataupun sudut pandang pelaksanaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan/strategi-strategi pemerintah yang terarah diperuntukan kepada seluruh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan publik atau yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

2.2.2 Tujuan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2008:63) tujuannya dapat dibedakan dalam tiga sisi, pertama yaitu sumber daya atau risoris adalah kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Kedua, regulatif dan deregulatif, dimana kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif bersifat membebaskan. Ketiga dinamisasi/stabilisasi, kebijakandinamisasi adalah kebijakan yang bersifat menggerakkan sumber daya nasional untuk mencapai kemajuan tertentu yang dikehendaki. Kebijakan stabilisasi bersifat mengerem dinamika yang terlalu cepat agar tidak merusak sistem yang ada, baik sistem politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial. Keempat, memperkuat negara/pasar. Kebijakan yang memperkuat negara, sementara kebijakan yang memperkuat pasar atau publik adalah kebijakan yang mendorong lebih besar publik atau mekanisme pasar daripada peran negara.

2.2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan

Universitas Indonesia

kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

Mazmanian dan Sabatier dikutip oleh Riant Nugroho (2009; 505) mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan,

“ Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision indentifies the problems to be addressed, stipulates the objectives to be pursued, and in a vaiety of ways, ”structured” the implementation process.”

Riant Nugroho (2009; 494-496) menjelaskan bahwa pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi turunan dari kebijakan publik. Kebijakan Publik merupakan keputusan otoritas negara untuk mengatur kehidupan bersama. Didalam kebijakan publik, tingkat keberhasilan implementasi adalah 60%, perencanaan 20% dan sisanya 20% adalah hal yang paling berat, yaitu pengendalian implementasi itu sendiri karena permasalahan yang tidak ada dalam konsep tetapi muncul dilapangan.

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier implementasi adalah upaya melaksanakan kebijakan , *“Implementation is the carrying out of basic plicy decision, usually incorporated in a statue but wich can also take the form of important executives orders to court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed, stipulated the objective(s) to be pursued, and in avariety of ways, ’structures’ the implementation process”*

Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat diklasifikasikan dalam tiga variabel, yaitu : a. *variabel independen*, yaitu mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator masalah teori

Universitas Indonesia

dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki; b. *variabel intervening*, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan; c. *variabel dependen*, yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indicator kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dan risorsis konsistuen, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana. (Nugroho, 2008).

Kebijakan public harus selalu diawasi dalam proses perjalanannya, tidak dapat dilepas begitu saja. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan (Riant Nugroho, 2008:471). Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public untuk dapat dipertanggung jawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan itu akan tercapai.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, mengajukan empat factor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, a. komunikasi (*communication*), berkenaan dengan bagaimana kebijakan itu dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau public; b. Sumber Daya (*Resources*), ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan; c. Disposisi (*dispotition*), sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat; d. Struktur Birokrasi (*Bureucrasy Structures*).

Komunikasi (Communication), dalam komunikasi kebijakan memiliki dua dimensi, yaitu transformasi, dan kejelasan,. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung kepada kebijakan publik tadi. Karena itu dimensi komunikasi mencakup tranformasi kebijakan, kejelasan, konsistensi. Dimensi kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group,dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung\ terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari

Universitas Indonesia

kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dimensi konsistensi, adanya aktifitas yang dilakukan secara terus-menerus agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan difahami oleh penerima pesan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai. Berelson & Steiner menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain (Riswandi, 2006).

Menurut Hovland, Janis & Kelley Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya, sedangkan Berelson & Steiner menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain (Riswandi, 2006). Harold Lasswell menyebutkan komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan “siapa” “mengatakan “apa” “dengan saluran apa”, “kepada siapa” , dan “dengan akibat apa” atau “hasil apa”. (*who says what in which channel to whom and with what effect*). Paradigma Lasswell tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur, yakni: komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Laswell menggunakan lima pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu: Siapa yang berbicara, apa isi pesan atau isi komunikasi, menggunakan media apa, siapa yang mendengarkan, dan pertanyaan terakhir adalah apa efek dari komunikasi tersebut (Effendy, 2009: 10). Sedangkan Pace dan Faules (2006) menjelaskan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: penciptaan pesan dan menafsirkan atau menterjemahkan pesan. Komunikasi organisasi mencakup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antar organisasi. Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa

Universitas Indonesia

yang harus dilakukan. Menurut Edwar dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: *transmission* atau cara penyampaian pesan, *clarity* atau kejelasan pesan.

Sumber Daya (*resources*), mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, seta bagaimana akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksanan kebijakan bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan sumber daya informasi dan kewenangan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia merupakan variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. "*Probably the most essential resources in implementing policy in staff*". (Edward III, 1980:53).

Sumber daya manusia(staff) harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian) dalam Edward III (1980, 10-11) ditegaskan, "*No matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if the personal responsible for carrying out of poliies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective*". Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staf yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staf pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas operasional sumberdaya manusia, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia terhadap pencapaian tujuan organisasi (Herman Sofyandi, 2008).

Ketersediaan staf dalam jumlah yang besar dan kemampuan yang tinggi perlu di dukung oleh motivasi. Diyakini motivasi adalah kondisi dasar yang

harus diperhatikan agar staf pelaksana kebijakan bersedia menjalankan kebijakan publik dengan baik. Motivasi adalah dorongan seseorang untuk mengambil tindakan karena orang tersebut ingin melakukan demikian (Moekijat, 1995). Apabila orang-orang di dorong maka mereka hanya mengadakan reaksi terhadap tekanan. Mereka bertindak karena merasa bahwa mereka harus melakukan demikian. Akan tetapi, apabila mereka dimotivasi, maka mereka mengadakan pilihan positif untuk melakukan sesuatu, karena mereka mengetahui tindakan ini mempunyai arti bagi mereka.

Effektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimana kebijakan pelaksanaan telah ditransformasikan dengan tepat dan aturan pelaksanaan kebijakan telah jelas dikomunikasikan, tetapi jika sumber daya manusia terbatas baik dari jumlah maupun kualitas (keahlian) pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Efektivitas pelaksanaan kebijakan juga tidak hanya mengandalkan banyaknya sumber daya manusia, tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut di jelaskan oleh Edward III (1980:61) :” *It is not enough for there to be an adequate number of implementers to carry out a policy, Implementors must posses the skill necessary for the job at the hand*”.

Sumber daya anggaran dan peralatan diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas dalam Edward III (1980:82) “ *Budgetary limitations and citizens opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of the services that implementers can be provide to be public*”. Kondisi tersebut menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentif sesuai dengan yang diharapkan sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program.

Disposisi (*Attitude*), keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui

Universitas Indonesia

apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan untuk memiliki kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dan disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan dimana akan menguntungkan bukan hanya organisasinya tetapi juga dirinya sendiri. Kecakapan saja tidak cukup tanpa komitmen dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah: Mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai; Penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja; Penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya; Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi lainnya. Menurut Edwar III implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya tidak efisiennya stuktur birokrasi (*deficiencies in bureaucracy structure*).

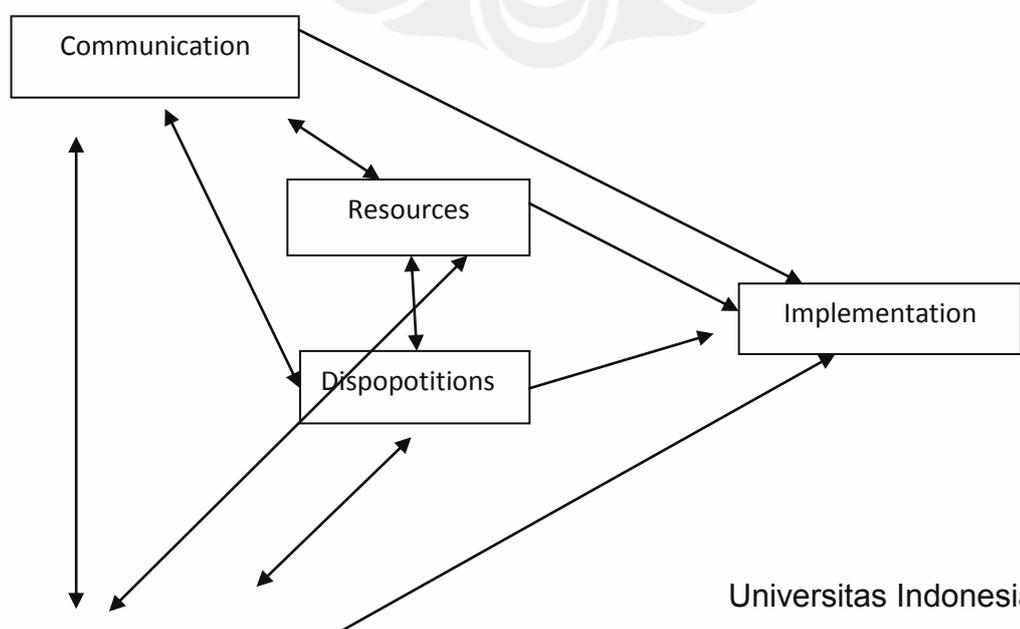
Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating*

procedures (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya. SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Edwards III mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa *fragmentation* adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. *Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatkan pelaksana kegiatan.

Bagan 1

Model George III, Edward (*Communication, Resources, Dispotition, bureucrazy structures*)



<p>Bureaucratic Structures</p>

Faktor tujuan dan sasaran, komunikasi, sumber daya disposisi, dan struktur birokrasi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan publik, dan dengan keempat faktor ini harus dilakukan secara simultan karena saling terkait erat.

Adapun tujuan dari konsep Edward III adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses dan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui explanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

2.3 Penanggulangan Bencana Dibidang Pendidikan

Penanganan pendidikan pada saat terjadinya bencana maupun pada tahap pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) dimaksudkan agar proses belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan meskipun bersifat darurat, selanjutnya dapat di tata kembali sesuai dengan kondisi awal bahkan lebih baik dari semula. Pada kondisi darurat, yaitu pada saat kejadian bencana atau tepat setelah terjadinya bencana, kegiatan lebih memfokuskan kepada kebutuhan prioritas dan kritis yang berkaitan dengan pemberian berbagai sarana darurat untuk sekolah maupun kebutuhan-kebutuhan pokok untuk proses belajar mengajar pada kondisi darurat.

Pada proses lebih lanjut, yaitu pada tahap pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), seluruh kegiatan yang direncanakan terhadap proses kegiatan belajar mengajar lebih mengarah kepada penataan secara permanen dari tujuan utama pembangunan pendidikan dalam kerangka tiga pilar pembangunan pendidikan, yaitu: peningkatan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan public.

Universitas Indonesia

Untuk mendukung tujuan dari semua langkah pada penanganan sekoalh di wilayah bencana, perlu adanya ketersediaan dana sesuai kebutuhan dari berbagai sumber dan keberhasilan akan dicapai apabila didukung oleh usaha dan keseriusan dari individu/kelompok yang langsung terlibat pada program tersebut, serta adanya partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, terbentuknya sinergi seluruh stakeholder pemerintah dengan masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama dalam melakukan usaha yang sejalan dengan konsep yang diberikan akan sangat mendukung keberhasilan program ini.

2.4 Bencana Alam

Bencana alam merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Fenomena alam yang terjadi tidak dapat diterka dan seringkali di luar logika manusia. Peristiwa alam yang terjadi sangat beragam, peristiwa alam ini lebih banyak dipicu oleh sentuhan tangan manusia baik yang legal maupun yang ilegal. Bencana Alam umumnya merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor yang terjadi secara bersama-sama.

Pemahaman terhadap berbagai jenis bencana adalah penting agar setiap pihak yang terkait akan lebih mempunyai kepedulian untuk memperkirakan bagaimana mengambil tindakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat penanganan.

2.4.1 Jenis-Jenis Bencana di Indonesia

Bencana dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu : Bencana alam, Bencana non alam dan bencana sosial. Dari ketiga kategori tersebut peneliti hanya menjelaskan berbagai jenis bencana alam yang lazim terjadi di wilayah Indonesia adalah bagian berikut :

1. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi terjadi karena gesekan antara lempeng-lempeng tektonik yang berada jauh di bawah permukaan bumi. Gesekan ini mengeluarkan energi yang luar biasa dan menimbulkan guncangan di permukaan.

Indonesia sangat rawan gempa karena berada dekat dengan lempeng-lempeng yang aktif dan saling berhubungan satu sama lain, serta karena adanya gunung-gunung berapi yang aktif.

Parameter untuk menilai tingkat bahaya gempa bumi adalah jumlah energi yang dikeluarkan pada episenter yang menunjukkan kekuatan dari getaran bumi. Gempa bumi dapat digambarkan dengan menggunakan dua skala yang berbeda dari ukuran yang memperlihatkan intensitas dan besarnya gempa.

Besarnya gempa bumi atau jumlah energi yang dikeluarkan ditentukan dengan menggunakan seismograf, dan alat yang secara terus-menerus mencatat getaran tanah. Skala yang dikembangkan oleh seorang ahli seismologi bernama **Charles Richter** yang secara matematis menyesuaikan angka-angka terhadap jarak episenter. Magnitudo gempa bumi menunjukkan besarnya energi yang dilepaskan pada pusat gempa bumi/hiposenter. Ukuran dan luas daerah kerusakan akibat gempa bumi secara kasar berhubungan dengan besarnya energi yang dilepaskan. Skala magnitudo gempa bumi biasanya dinyatakan dalam **skala Richter**.

Tipe skala kedua adalah skala intensitas gempa bumi, mengukur pengaruh-pengaruh dari suatu gempa bumi dimana gempa tersebut terjadi. Skala yang paling luas dipakai dari tipe ini dikembangkan pada tahun 1902 oleh Marcalli, seorang ahli seismologi Italia. Skala ini dikembangkan dan dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan jaman modern, disebut **Skala Marcalli yang Dimodifikasi**, skala ini menggambarkan intensitas pengaruh gempa bumi terhadap manusia, bangunan dan permukaan bumi dalam satuan angka dari I sampai dengan XII.

Elemen yang paling beresiko terhadap gempa bumi adalah kumpulan bangunan yang lemah dengan tingkat hunian yang tinggi. Bangunan yang

Universitas Indonesia

didirikan tidak mengikuti kaidah-kaidah teknik secara benar, penggunaan atap yang terlalu berat, bangunan berkualitas rendah, bangunan-bangunan dengan konstruksi yang cacat, bangunan yang dibangun pada tanah yang lembek, bangunan yang ditempatkan pada lereng-lereng yang lemah.

2. Banjir dan Bahaya-Bahaya Air

Ada dua pengertian banjir : (1) aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air; (2) gelombang banjir berjalan ke arah hilir sistem sungai yang berinteraksi dengan kenaikan muka air dimuara akibat badai.

Untuk negara tropis, berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut : (1) banjir yang diakibatkan oleh hujan lebat yang melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem drainase buatan manusia; (2) banjir yang disebabkan meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat pasang laut maupun meningginya gelombang laut akibat badai; (3) banjir yang disebabkan oleh kegagalan bangunan air buatan manusia seperti bendungan, bendung, tanggul, dan bangunan pengendalian banjir; (4) banjir akibat kegagalan bendungan alam atau penyumbatan aliran sungai akibat runtuhnya/longsornya tebing sungai. Ketika sumbatan/bendungan tidak dapat menahan tekanan air maka bendungan akan hancur, air sungai yang terbungung mengalir deras sebagai banjir bandang. Contoh banjir bandang jenis ini terjadi pada banjir di Bohorok, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara.

Elemen yang paling beresiko adalah apapun yang berada di wilayah banjir. Banjir cukup sensitif terhadap komponen bangunan yang mudah menyerap air, antara lain bangunan dari tanah ataupun tembok bata yang dicampur dengan siar/plesteran semen-pasir yang dibuat tidak kedap air, dan bangunan yang menggunakan pondasi dangkal atau yang berdaya tahan lemah

Universitas Indonesia

terhadap beban samping. Parameter untuk menilai tingkat bahaya banjir adalah dari sisi kedalaman atau ketinggian air, kecepatan aliran air, jumlah endapan lumpur atau lumpur yang tertahan serta lamanya genangan air.

3. Letusan Gunung Berapi

Letusan gunung berapi merupakan letusan eksplosif atau bertahap, yang mengeluarkan abu panas, aliran pyroklastik, gas dan debu. Kekuatan-kekuatan letusan bisa menghancurkan bangunan, infrastruktur, hutan-hutan dan gas beracun, abu panas maupun aliran lava panasnya dapat menghilangkan nyawa makhluk hidup yang berada disekitar letusan gunung tersebut.

Tidak ada skala untuk mengukur besarnya letusan-letusan gunung berapi yang disepakati secara internasional, seperti yang berlaku terhadap gempa bumi. Indeks letusan vulkanis (baca : VEI) menerangkan tentang energi yang dilepaskan dalam satu letusan vulkanis yang didasarkan pada ukuran zat-zat yang dikeluarkan dan tingginya awan letusan. Skala VEI berkisar antara 0 sampai 8. Letusan yang paling besar yang pernah dicatat adalah di Tambora, Indonesia pada tahun 1815 yang ditentukan VEI nya sebesar 7.

Elemen yang paling beresiko adalah apapun yang berada didekat gunung berapi, atap-atap rumah atau bangunan yang mudah terbakar, persediaan air yang rentan terkena debu, bangunan-bangunan lemah serta tanaman pangan dan ternak.

Parameter untuk menilai tingkat bahaya dari gunung berapi adalah volume materi yang dikeluarkan, daya letusan dan lamanya letusan, radius letusan dan dalamnya endapan debu.

4. Instabilitas Tanah

Tanah longsor adalah terjadinya pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya bencana ini adalah lereng yang gundul serta kondisi tanah dan bebatuan yang rapuh. Air hujan adalah pemicu utama terjadinya longsor. Ulah manusiapun bisa menjadi

penyebab tanah longsor seperti penambangan tanah, pasir dan batu yang tidak terkendalikan.

Proses pemicu tanah longsor dapat berupa :

- a. Peningkatan kandungan air dalam lereng, sehingga terjadi akumulasi air yang merenggangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah untuk longsor. Peningkatan kandungan air ini sering disebabkan oleh meresapnya air hujan, air kolam/selokan yang bocor atau air sawah ke dalam lereng.
- b. Getaran pada lereng akibat gempa bumi ataupun ledakan, penggalian, getaran alat/kendaraan. Gempa bumi pada tanah pasir dengan kandungan air sering mengakibatkan *liquifaction* (tanah kehilangan kekuatan geser dan daya dukung, yang diiringi dengan penggenangan tanah oleh air dari bawah tanah).
- c. Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Beban yang berlebihan ini dapat berupa beban bangunan atau pohon-pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari 40 derajat.
- d. Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga.

Elemen yang paling beresiko adalah pemukiman atau sarana sosial yang dibangun pada lereng-lereng yang terjal, tanah yang lembek atau di sepanjang puncak batu karang. Bangunan yang dibangun pada dasar lereng yang terjal atau pada tanah endapan sungai.

Parameter untuk menilai tingkat bahaya dari instabilitas tanah adalah volume material yang dikeluarkan (meter kubik), daerah yang terkubur atau yang dipengaruhi instabilitas tanah, kecepatan longsor dalam cm/hari serta ukuran dari besarnya batu.

5. Angin Kencang (Topan, Hurricane, Angin Puyuh, Badai Tropis)

Universitas Indonesia

Pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.

Angin kencang disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem. Sistem pusaran ini bergerak dengan kecepatan sekitar 20 km/jam. Di Indonesia, angin ini dikenal sebagai badai, di Samudra Pasifik sebagai angin taifun (*typhoon*), di Samudra Hindia disebut siklon (*cyclone*), dan di Amerika Serikat dinamakan *hurricane*.

Tekanan dan hisapan dari tenaga angin meniup selama beberapa jam. Tenaga angin yang kuat dapat merobohkan bangunan. Umumnya kerusakan dialami oleh bangunan dan bagian non struktural seperti atap, antena, papan reklame dan sebagainya. Badai yang terjadi di laut atau danau dapat menyebabkan kapal tenggelam. Kebanyakan angin badai disertai dengan hujan deras yang dapat menimbulkan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir.

Elemen yang paling beresiko adalah bangunan-bangunan ringan dan rumah dari kayu. Bagian atap, penutup atap, pelapis-pelapis dinding yang ringan dan menggunakan perkuatan yang tidak baik serta papan-papan. Elemen bangunan yang dikaitkan atau menggunakan perkuatan yang tidak baik/lemah.

Parameter untuk menilai tingkat bahaya dari angin kencang adalah kecepatan angin dan skala-skala badai angin (contoh Beaufort) atau kedahsyatan angin. Data kecepatan dan arah angin dari stasiun dan satelit meteorologi memberikan informasi tentang kuat dan pola pergerakan angin di suatu daerah. Faktor lokal seperti topografi, vegetasi dan daerah permukiman dapat berpengaruh terhadap cuaca lokal. Catatan kejadian angin badai dimasa lalu dapat digunakan untuk mengetahui pola umum kejadian angin badai dimasa yang akan datang.

6. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang “tsu” berarti pelabuhan, “nami” berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di Pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsor. Apapun penyebabnya, air laut terdorong oleh satu gerakan yang kuat dan membumbung ke atas, akhirnya membanjiri daratan dengan kekuatan merusak yang besar.

Tsunami berbeda dari gelombang laut biasa, yang dihasilkan oleh angin yang bertiup di atas air. Gelombang biasa jarang yang lebih panjang dari 300 meter dari puncak gelombang yang satu ke yang lainnya. Akan tetapi, tsunami bisa berukuran 150 km antara puncak gelombang yang satu dengan puncak gelombang berikutnya. Tsunami berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan ombak biasa. Dibandingkan dengan kecepatan ombak biasa sekitar 100 km per jam, tsunami pada air dalam lautan bisa berjalan seperti kecepatan pesawat jet – 800 km per jam.

Tanda awal di daerah pantai akan adanya tsunami tergantung pada bagian mana dari gelombang itu yang mencapai daratan : satu puncak gelombang menyebabkan peningkatan tingkat air dan terobosan gelombang akan menyebabkan berbaliknya kembali gelombang itu. Peningkatan mungkin saja tidak cukup signifikan untuk diketahui oleh khalayak umum. Para pengamat lebih cenderung memperhatikan baliknya air yang bisa menyebabkan ikan bergeleparan pada dasar laut. Tsunami tidak selalu muncul seperti tembok air vertikal, yang dikenal sebagai *bore*, seperti yang lazimnya dipotret pada lukisan-lukisan. Lebih sering pengaruhnya adalah datangnya air pasang yang membanjiri daratan.

7. Bahaya-bahaya Teknologi

Bahaya-bahaya teknologi anantara lain adalah:

- a. Ledakan-ledakan yang akan mengakibatkan kematian, cedera, kerusakan-kerusakan bangunan dan infrastruktur

Universitas Indonesia

- b. Kecelakaan transportasi
- c. Zat-zat polutan yang berbahaya, zat-zat kimia yang berbahaya yang dilepas kedalam udara atau air yang dapat menempuh jarak jauh dan berakibat terkontaminasinya lingkungan melalui udara dan air
- d. Kebakaran-kebakaran industri dapat mencapai temperatur yang sangat tinggi dan mempengaruhi daerah-daerah yang laus
- e. Kegagalan pelaksanaan teknologi, antara lain: Lumpur lapindo

Elemen-elemen yang paling beresiko adalah pemukiman, bangunan-bangunan yang berdekatan atau manusia, ternak dan tanaman atau sarana sosial di sekitar wilayah industri yang berpotensi mengeluarkan polutan dengan kadar besar. Selain itu juga tidak disiplinnya personil pengguna lalu lintas.

Parameter untuk menilai tingkat bahaya dari bahaya-bahaya teknologi adalah kuantitas zat berbahaya yang dilepas, temperatur api, tingkat kerusakan ledakan, area kontaminasi (air, laut, udara, air tanah), dan area kontaminasi lokal.

2.4.2 Dampak Bencana

Banyaknya peristiwa bencana alam yang terjadi akan memberikan dampak terburuk yaitu menimbulkan korban jiwa, gangguan psikologis serta kerugian harta benda yang besar di sebagian besar wilayah Indonesia. Dari beberapa dampak bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia, gempa bumi, tanah longsor dan banjir termasuk katagori bencana alam yang menimbulkan paling banyak kerugian .

Dampak dari bencana akan mengakibatkan berbagai sektor rusak dan terganggu, antara lain adalah:

- a. Kerusakan dan kerugian yang terjadi pada perumahan penduduk
- b. Mengganggu perekonomian masyarakat dan meningkatnya angka pengangguran

- c. Kerusakan cukup parah pada sektor sosial, anatara lain: sektor kesehatan dan sektor pendidikan
- d. Kerusakan pada infrastruktur pedesaan dan perkotaan
- e. Timbulnya trauma psikologis pada penduduk disekitar wilayah terjadinya gempa
- f. Meningkatnya angka kemiskinan penduduk

Secara spesifik dampak dari bencana diuraikan pada bagian berikut ini.

1. Gempa Bumi

Secara umum dampak gempa bumi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kerusakan fisik

Kerusakan terjadi terhadap hunian-hunian manusia, bangunan-bangunan umum (termasuk sekolah), jembatan, jalan, jalan kereta api, fasilitas pengolahan air, peralatan dari pipa, dan pembangkit listrik. Guncangan yang timbul setelah gempa dapat menyebabkan banyak kerusakan terhadap struktur yang memang kondisinya sudah lemah.

Pengaruh-pengaruh sekunder yang signifikan mencakup kebakaran, jebolnya bendungan, dan tanah longsor yang bisa menutup terusan-terusan air dan juga menyebabkan banjir. Kerusakan bisa terjadi terhadap fasilitas-fasilitas yang menggunakan atau memproduksi bahan-bahan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kemungkinan tumpahnya bahan-bahan kimia. Bisa juga terjadi rusaknya fasilitas komunikasi.

Kerusakan properti dapat menimbulkan dampak serius terhadap kebutuhan-kebutuhan tempat berlindung, tempat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, produksi ekonomi dan standar-standar kehidupan dari populasi setempat.

b. Korban

Tingkat korban sering kali tinggi, khususnya ketika gempa bumi terjadi pada kondisi sebagai berikut :

- Kepadatan penduduknya tinggi, khususnya di jalan-jalan di antara bangunan berukuran sempit dan bangunan-bangunan itu sendiri tidak tahan gempa, dan tanahnya miring dan tidak stabil; atau
- Konstruksi batu bata atau batu kering sudah menjadi hal yang umum dengan lantai-lantai tinggi dan atap-atap yang berat; atau
- Gempa terjadi pada malam hari, karena goncangan-goncangan awal tidak terasa pada saat tidur dan orang-orang tidak memperoleh informasi dari media untuk bisa menerima peringatan.

2. Banjir dan Bahaya-bahaya Air

Secara umum dampak banjir dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kerusakan fisik

Bangunan-bangunan rusak oleh karena : (i) dampak kekuatan air banjir terhadap bangunan, (ii) barang-barang yang mengapung pada perairan-perairan yang menaik, (iii) menjadi tergenangi air, (iv) roboh karena bagian bawahnya terpotong oleh gesekan atau erosi dan (v) rusak oleh air yang membawa puing-puing

Kerusakan cenderung lebih besar di daerah-daerah lembah dibandingkan dengan daerah-daerah terbuka, yang posisinya rendah. Banjir bandang sering menyapu segala sesuatu yang berada pada jalurnya. Di daerah-daerah pantai, gelombang-gelombang badai merusak baik pada saat menghantam masuk dan sekali lagi pada saat keluar menuju ke laut. Lumpur, minyak dan polutan lain yang terbawa oleh air akan tertimbun dan merusak tanaman pangan dan isi bangunan. Kejenuhan tanah bisa menyebabkan tanah longsor atau kerusakan tanah.

b. Korban

Arus yang bergerak atau air yang bergolak dapat menghancurkan dan menghanyutkan orang-orang dan binatang pada kedalaman air yang relatif dangkal. Banjir besar bisa menyebabkan kematian dalam jumlah besar karena hanyut dan menimbulkan luka. Banjir yang lambat relatif

sedikit saja menyebabkan kematian secara langsung atau korban luka-luka.

Penyakit endemis akan berlanjut pada daerah-daerah banjir, tetapi hanya sedikit saja ditemukan banjir yang secara langsung dapat menyebabkan bertambahnya masalah-masalah kesehatan dalam skala besar kecuali penyakit diare, malaria dan mewabahnya virus-virus lain selama delapan sampai sepuluh minggu setelah terjadinya banjir.

3. Letusan Gunung Berapi

Secara umum dampak letusan gunung berapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Infrastruktur dan hunian

Kerusakan total dari segala sesuatu yang berada pada jalur pyroclastic, lumpur atau aliran-aliran lava akan terjadi, termasuk pada vegetasi, lahan pertanian, hunian manusia, bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan dan infrastruktur yang lain. Bangunan-bangunan bisa runtuh menahan beban abu yang berat, khususnya jika abu tersebut basah. Abu yang berjatuhan mungkin cukup panas untuk bisa menyebabkan kebakaran. Banjir bisa saja terjadi karena sungai-sungai yang tertimbun dengan endapan-endapan vulkanis atau melelehnya salju dalam jumlah yang besar. Abu yang jatuh dapat menghancurkan sistem mekanis dengan menyumbat pintu-pintu seperti pada sistem irigasi, mesin-mesin pesawat terbang dan mesin-mesin yang lain. Sistem komunikasi dapat terganggu karena adanya badai listrik yang berkembang dari gumpalan awan-abu. Transportasi udara, darat dan laut bisa terpengaruh. Gangguan pada lalu lintas udara dari letusan-letusan abu yang besar bisa berdampak serius terhadap respon emergensi.

b. Korban

Kematian bisa terjadi karena aliran lumpur dan aliran pyroclastic dan jauh lebih sedikit dari aliran lava dan gas-gas beracun. Mereka yang luka bisa disebabkan karena pecahan-pecahan batu yang berjatuhan dan karena

Universitas Indonesia

terkubur di dalam lumpur. Luka bakar di kulit dan kebakaran yang lain sampai saluran pernapasan dan paru-paru mungkin sebagai akibat dari awan panas. Jatuhnya abu dan gas-gas beracun bisa menyebabkan kesulitan pernapasan baik untuk manusia maupun binatang.

4. Instabilitas Tanah

Secara umum dampak tanah longsor dapat dikelompokkan sebagai berikut

a. Kerusakan fisik

Segala sesuatu yang berada di atas atau pada jalur tanah longsor akan menderita kerusakan. Lagi pula, kepingan-kepingan batu bisa merusak jalur-jalur komunikasi atau menutup jalan-jalan besar. Sungai-sungai bisa tersumbat yang bisa menimbulkan resiko banjir. Korban bisa saja tidak menyebar luas, kecuali dalam kasus gerakan-gerakan yang besar yang disebabkan karena bahaya-bahaya besar seperti gempa bumi dan gunung berapi.

b. Korban

Korban-korban fatal terjadi karena rusaknya lereng dimana tekanan penduduk telah mempercepat hunian di daerah-daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Korban muncul sebagai akibat runtuhnya bangunan atau terkubur oleh puing-puing tanah longsor.

5. Angin Kencang (Topan, Hurricane, Angin Puyuh, Badai Tropis)

Secara umum dampak angin badai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kerusakan fisik

Perkampungan yang terletak secara terbuka, daerah-daerah pantai yang rendah akan rentan terhadap pengaruh-pengaruh langsung dari angin badai. Kualitas bangunan akan menentukan daya tahan terhadap pengaruh-pengaruh angin badai. Yang paling rawan adalah bangunan-bangunan ringan dengan kerangka-kerangka kayu, bangunan-bangunan tua dengan tembok-tembok yang telah melemah, dan rumah-rumah yang dibuat dari blok beton yang tidak berkerangka. Elemen-elemen

Universitas Indonesia

infrastruktur yang beresiko khusus adalah tiang-tiang telepon, tiang-tiang listrik, kapal-kapal nelayan dan industri-industri kelautan lain.

b. Korban

Relatif terdapat sedikit korban yang mati, akan tetapi mungkin banyak korban yang luka-luka akibat angin badai.

6. Tsunami

Secara umum dampak tsunami dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kerusakan fisik

Kejadian-kejadian tsunami lokal atau kejadian-kejadian yang berlangsung kurang dari 30 menit dari sumber penyebabnya yang mengakibatkan kerusakan paling banyak. Kekuatan air pada gelombang pasang surut gelombang yang berujung tajam yang bergerak ke daratan dengan kecepatan tinggi dapat menghancurkan segala sesuatu yang berada pada jalurnya dengan tekanan sampai dengan 10.000 kg per meter kubik. Ini merupakan pengaruh banjir tsunami, meskipun demikian, itulah yang paling banyak mempengaruhi hunian manusia oleh karena kerusakan yang diakibatkan air terhadap rumah-rumah, bangunan-bangunan umum (termasuk sekolah), jalan-jalan, jembatan-jembatan, dan infrastruktur lainnya.

Baliknya gelombang tsunami juga menyebabkan kerusakan yang signifikan. Pada saat gelombang berbalik menuju ke lautan, lapisan-lapisan dasar tersapu yang meruntuhkan dermaga-dermaga dan fasilitas-fasilitas pelabuhan dan menyapu pondasi-pondasi bangunan. Keseluruhan pantai telah lenyap dan bangunan-bangunan terbawa ke lautan. Ketinggian air dan arus bisa berubah secara tidak menentu dan kapal-kapal dari berbagai ukuran tergenang air, tenggelam, atau saling berbenturan. Kerusakan terhadap pelabuhan-pelabuhan dan bandara bisa menghalangi pengiriman cadangan obat-obatan dan makanan yang diperlukan.

Universitas Indonesia

b. Korban

Kematian terjadi terutama karena tenggelam pada saat air menggenangi rumah-rumah atau bangunan-bangunan umum (termasuk sekolah). Banyak orang yang hanyut ke laut atau dihantam gelombang yang besar. Mungkin terdapat orang-orang yang luka karena benturan puing-puing dan luka bisa menjadi terkontaminasi. Beberapa orang bisa terjangkit penyakit radang paru-paru karena menghirup air yang sudah terkena polusi.

7. Bahaya-bahaya Teknologi

Secara umum dampak bahaya teknologi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Fisik

Komponen yang terancam akibat kegagalan teknologi adalah bangunan sekitar atau kendaraan, cadangan pangan/tanaman pertanian, sumber air, flora dan fauna di daerah sekitarnya (dapat mencapai ratusan kilometer dalam kasus seperti radioaktif serta polutan yang tersebar dari udara).

b. Korban

Penduduk sekitar atau penumpang kendaraan.

2.4.3 Mitigasi Bencana

Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali dari mitigasi fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya didalam rencana penggunaan lahan. Mitigasi bencana adalah istilah yang

Universitas Indonesia

digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang.

Mitigasi bencana mencakup baik perencanaan maupun pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi resiko-resiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang sudah diketahui, serta proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana-bencana yang benar-benar terjadi.

2.5 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

Struktur Birokrasi sebagai penentu utama didalam proses kebijakan, sangat dipengaruhi oleh variable-variabel (Komunikasi, Sumber daya dan Disposisi) yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan ini, sehingga Implementasi Kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan standar-standar dan kaidah-kaidah dalam penanggulangan bencana di bidang pendidikan.

2.5.1 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini ada beberapa komponen yang dapat menjadi unsur-unsur kerangka berpikir yang akan menjadi landasan pemikiran rancangan yang akan diajukan peneliti, yaitu :

Hubungan antara Struktur Birokrasi dengan Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi; Hubungan antara Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dengan Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan; Hubungan antara Struktur Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.

2.5.1.1 Hubungan antara Struktur Birokrasi dengan Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi

Struktur Birokrasi dalam konsep pelayanan publik adalah merupakan aktor sekaligus sebuah sistem/proses yang menjamin dan memberikan pelayanan

Universitas Indonesia

terhadap masyarakat, dan pelayanan publik merupakan proses sekaligus output (keluaran) pelayanan terhadap masyarakat.

Didalam dimensi fragmentasi ditegaskan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana para pelaksana kebijakan akan mempunyai peluang yang besar atas berita/instruksinya dan akan terdistorsi. Semakin terfragmentasinya suatu birokrasi akan membuat pelaksana kebijakan membutuhkan koordinasi yang intensif.

Dalam fragmentasi birokrasi akan membatasi kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu. Akibat lebih lanjut adalah dapat terjadinya ketidak efisienan dan pemborosan sumber daya langka.

Edward III menyebutkan dalam disposisi ada dua hal penting yang harus difahami, yaitu staffing birokrasi dan insentif bagi pelaksana kebijakan. Staffing birokrasi menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menempatkan stafnya dalam struktur organisasi pelaksana demi terjaminnya pelaksanaan kebijakan. Sedangkan insentif menekankan pada tingkat kecukupan/reward yang akan diterima oleh pelaksana kebijakan berhasil melaksanakan kebijakan. Insentif sebagai sarana pengendalian bagi pelaksana kebijakan untuk mau melakukan apa yang direncanakan oleh pembuat kebijakan.

2.5.1.2 Hubungan antara Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi dengan Implementasi Kebijakan

Efektif tidaknya komunikasi dalam sebuah kebijakan menurut Edward III dipengaruhi oleh 3 dimensi, transmisi, kejelasan dan konsistensi. Konsep komunikasi pada umumnya hanya menganalisa apakah pesan yang disampaikan komunikator dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh komunikan. Perkembangan ilmu komunikasi saat ini menyatakan bahwa komunikasi disebut efektif manakala pesan yang disampaikan komunikator bukan saja diterima dengan jelas, tetapi juga dapat mempengaruhi dan dilaksanakan oleh komunikan.

Tanpa kecukupan sumber daya apa yang direncanakan tidak akan sama dengan apa yang akhirnya dilaksanakan, dengan kata lain implementasi suatu kebijakan akan berhasil apabila cukup akan ketersediaan sumber daya.

Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Terdapat tiga bentuk sikap implementor terhadap kebijakan, yaitu : kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

2.5.1.2 Hubungan antara Struktur Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi yang akan menyeragamkan dan memudahkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Bila tidak ada keefisienan struktur birokrasi maka implementasi kebijakan belum bisa disebut efektif didalam pelaksanaannya.

Tabel 2. Operasional Konsep Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana bidang pendidikan

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
1.	<p>Komunikasi.</p> <p>Definisi Konseptual. Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi</p>	<p>1. Transmisi Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan</p>	<p>a. Disampaikan dengan berbagai media. b. Frekuensi penyampaian informasi mengenai penanggulangan bencana bidang pendidikan. c. Disampaikan Secara langsung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik • Baik • Cukup Baik • Tidak Baik • Sangat tidak baik

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
	<p>kebijakan terkait.</p> <p>Definisi Operasional : Kebijakan dikomunikasikan kepada dinas prop/kab/kot dan Tim Perencana/Pengawas di daerah yang terkena bencana melalui sosialisasi melalui pelatihan-pelatihan secara kontinyu sehingga kejelasan dapat tercapai sesuai dengan tujuannya.</p>	<p>2. Kejelasan Pesan Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan Cara penyampaian Kebijakan dari Pemerintah Pusat/Daerah • Kejelasan Penggunaan bahasa dalam Penyampaian Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat jelas • jelas • Cukup jelas • Tidak jelas • Sangat tidak jelas

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
2.	<p>Sumber-sumber</p> <p>○ Definisi Konseptual Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.</p> <p>Definisi Operasional : Kualitas dan kuantitas SDM, fasilitas pendukung, keuangan, dan informasi & kewenangan dalam mendukung terlaksananya implementasi Penanggulangan Bencana</p>	<p>1. Kuantitas SDM Rasio sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai penanggulangan bencana bidang pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai • Memadai • Cukup Memadai • Tidak Memadai • Sangat tidak Memadai
		<p>2. Kualitas SDM Pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SDM yang sesuai dengan bidang keahlian dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik • Baik • Cukup Baik • Tidak Baik • Sangat tidak baik

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
	Bidang Pendidikan..	3. Fasilitas Fasilitas pendukung pelaksanaan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersedian sarana prasarana. • Kemudahan dalam penggunaan bahan • Keterpeliharaan sarana prasarana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik • Baik • Cukup Baik • Tidak Baik • Sangat tidak baik
		4. Keuangan Pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan dana dari Pemerintah Pusat • Ketersediaan dana dari Pemerintah Daerah • Ketersediaan dana dari pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai • Memadai • Cukup Memadai • Tidak Memadai • Sangat tidak Memadai

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
3	Disposisi ○ Definisi Konseptual Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan. ○ Definisi Operasional Komitmen pelaksana dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan, penempatan staff dan pemberian intensif jika berhasil menerapkan	1. Komitmen Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen implementator terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik • Baik • Cukup Baik • Tidak Baik • Sangat tidak baik
		2. Penempatan Staf Penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Penempatan staf yang responsive terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Sesuai • Sesuai • Cukup Sesuai • Tidak Sesuai • Sangat tidak Sesuai

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
	kebijakan.	3. Insentif Intensif yang diberikan sesuai dengan porsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Penghargaan yang proporsional bagi pelaksana kebijakan • Penghargaan memiliki nilai penting bagi pelaksana kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai • Memadai • Cukup Memadai • Tidak Memadai • Sangat tidak Memadai
	Struktur Birokrasi. <ul style="list-style-type: none"> ○ Definisi Konseptual Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan 	1. Prosedur Operasional Standar (POS) Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan SOP dalam penyelenggaraan kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Tersedia • Tersedia • Cukup Tersedia • Tidak Tersedia • Sangat tidak Tersedia

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
	Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan ○ Definisi Operasional <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> dan pembagian tugas serta pertanggungjawabannya (fragmantasi).	2.Fragmantation Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> • Batasan dalam pembagian tugas dan tanggungjawab bagi pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat Memadai • Memadai • Cukup Memadai • Tidak Memadai • Sangat tidak Memadai

Tabel 3. Operasional Faktor Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan bencana bidang pendidikan

No.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi	Sub Faktor	Informan	Tujuan
	<p>Komunikasi.</p> <p>Definisi Konseptual. Penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dari pembuat kepada pelaksana kebijakan mengenai implementasi kebijakan terkait.</p>	<p>Transmisi Adanya cara penyampaian yang tepat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah • Dinas Pendidikan • TimPerencana/pengawas 	<p>Untuk mengetahui efektifitas penyampaian sosialisasi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan.</p>
		<p>Kejelasan Pesan Adanya kejelasan pesan yang disampaikan mengenai penanggulangan bencana bidang pendidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sekolah 	<p>Sejauh mana kepala sekolah dapat memahami isi/substansi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan</p>
	<p>Sumber-sumber</p> <p>Adalah Sumberdaya pelaksana kebijakan.</p>	<p>Kuantitas SDM Adanya sumberdaya yang sesuai dengan ketentuan dalam mendukung kebijakan mengenai penanggulangan bencana bidang pendidikan.</p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan pengawas</p>	<p>Untuk mengetahui apakah jumlah tenaga yang mensosialisasikan kebijakan dan tenaga implementator kebijakan sudah mencukupi.</p>
		<p>Kualitas SDM Pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dibidangnya.</p>	<p>Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Pengawas</p>	<p>Untuk mengetahui apakah masih diperlukan peningkatan kualitas SDM.</p>

<p>Disposisi</p> <p>Definisi Konseptual Kecenderungan/keinginan pelaku kebijakan memiliki disposisi terhadap kebijakan.</p>	<p>3 Komitmen Adanya komitmen dari implementator dalam melaksanakan program penanggulangan bencana bidang pendidikan.</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui komitmen implementator terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan.
	<p>4 Penempatan Staf Adanya penempatan staf yang sesuai dengan keahliannya.</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui penempatan staf dalam menjalankan program penanggulangan bencana bidang pendidikan.
	<p>5 Insentif Adanya insentif yang diberikan sesuai dengan porsinya</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui pemberian insentif dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan.
<p>Struktur Birokrasi.</p> <p>Definisi Konseptual Struktur organisasi atau pola hubungan antar jajaran birokrasi dalam pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan</p>	<p>6 Prosedur Operasional Standar (POS) Adanya sejenis <i>standard operating procedures (SOP)</i></p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan.
	<p>Fragmentation Adanya pembagian tugas dan pertanggungjawaban</p>	Kepala Sekolah Dinas Pendidikan	Untuk mengetahui pembagian tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan..



Universitas Indonesia



Universitas Indonesia



Universitas Indonesia

Tabel 4. Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
1.	Winda Paramita Judul: Analisis Faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan Di Wilayah Jawa Barat	Menganalisis Faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi pada implementasi kebijakan program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan di Jawa Barat.	Mix methode (kuantitatif dan kualitatif) Wawancara	Kesimpulannya bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komuniaksi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori sedang, artinya bahwa pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.
2.	Siti Irene Astuti dan Sudaryono	Untuk menggali	Research &	Kesimpulannya bahwa pemahaman

No.	Penulis dan Judul	Tujuan	Metode	Hasil penelitian
	Judul: Peran sekolah dalam pembelajaran mitigasi bencana. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 di Solo	pemahaman siswa tentang aspek-aspek berkaitan dengan mitigasi bencana dan mengembangkan modul tentang wacana bencana alam.	Development Survey	responsive siswa terhadap mitigasi bencana gempa dan tsunami lebih rendah disbanding dengan pemahaman dan responsive mahasiswa terhadap bencana banjir dan gunung meletus.
3.	Saru Arifin Judul: Model Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Bagi Difabel (Studi Kasus di Bantul, Yogyakarta)	Untuk mengetahui pola kebijakan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana alam bagi difabel	Deskriptif kualitatif.	Pemerintah daerah tidak mempunyai komitmen program secara khusus dilakukan untuk merehabilitasi secara ekonomi maupun social bagi penyandang difabel.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini, dibahas mengenai pendekatan penelitian, obyek dan lokasi penelitian metode penelitian, metode pengumpulan data, instrument pengumpulan data, informan, teknik analisis data yang dipergunakan untuk melakukan penelitian dan analisis implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan di Tasikmalaya dan Cianjur.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Newman (2003:64) menyatakan bahwa pendekatan positivism pada dasarnya merupakan pendekatan kuantitatif. Dengan pendekatan positivisme dalam metodologi penelitian kuantitatif, menuntut adanya rancangan penelitian yang menspesifikkan objeknya secara eksplisit, dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Metodologi penelitian kuantitatif mempunyai batasan-batasan pemikiran yaitu: korelasi, kausalitas, dan interaktif; sedangkan objek data, ditata dalam tatapikir kategorisasi, interfalisasik dan kontinuasi. (Muhadjir,2008. 12).

Pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan realitas factor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan bencana bidang pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya dan Cianjur.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang analisis factor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Penanggulangan bencana bidang pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi

Universitas Indonesia

dan struktur birokrasi. Karena penelitian ini mempertanyakan suatu obyek secara mendalam dan tuntas, dan keakuratan deskripsi setiap variable, maka metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *mix method*, yaitu metode pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif.

3.2.1. Populasi

Populasi target dalam penelitian ini terdiri dari sekolah-sekolah yang melaksanakan kebijakan program penanggulangan bencana bidang pendidikan di Jawa Barat tahun 2010 yang berjumlah 84 sekolah baik SD, SMP maupun SMA dengan rincian sebagai berikut:

**DAFTAR SEKOLAH PENERIMA SUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2010
DI KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KABUPATEN CIANJUR**

Tasikmalaya		Cianjur	
No.	Sekolah	No.	Sekolah
1	SDN Negla	1	SDN. Cipinang
2	SDN Lebaksiuh	2	SDN. Pagermaneuh
3	SDN Cigorowong 2	3	SDN. Margasari
4	SDN Lokasari	4	SDN. Yugasari
5	SDN Purabaya	5	SDN. Cicadas
6	SDN Cigowak	6	MIS. Ciwalen
7	SDN Cirangkong	7	SDN. Margaluyu
8	SDN Timuhegar	8	SDN Tegalega
9	SDN Manonjaya 4	9	MIS. Ridogalih
10	SDN Pasirmerak	10	SDN. Bojongsari
11	SDN. Cileuleus	11	SDN. Jatinegara
12	SDN. Inpres Sindang Sari	12	SDN. Sukarame
13	SDN. Langensari	13	SDN. Sukabagja
14	SDN. Mekarwangi	14	SDN. Girijaya
15	SDN. Sukamulya	15	SDN. Karang Tengah 2
16	SDN. Cikondang	16	SDN. Pada Makmur 2
17	SDN. Jahiang	17	SDN Karangtengah 1
18	SDN. Karangantungan	18	SDN. Baranangsiang
19	SDN. Mekarsari	19	SDN. Simpang 1
20	SDN. Neglasari	20	MIS. Cipaduni
21	SDN. Padasirna	21	MIS. Pasir Jambu
22	SDN. Setiabhakti	22	SDN. Sukarama
23	SDN. Singdanghurip	23	SDN. Sukamenak
24	SDN. Singdangmukti	24	SDN. Warnasari
25	SMPN 1 Bantarkalong	25	SDN. Panyaweuyan
26	SMPN 1 Cisayong	26	SDN. Sukakerta
27	SMP Yapida Cisayong	27	SDN. Tegal Merak
28	SMPN 1 Salawu	28	SDN Wangun
29	SMPN 1 Taraju	29	SDN. Sukarajin
30	SMPN 1 Bojonggambir	30	SDN. Cibinong 1
31	SMPN 1 Sukarame	31	SDN. Puncak I
32	SMPN 1 Pasirageung	32	SDN. Sukahegar
33	SMK MJPS 3 Tasikmalaya	33	SDN. Winayakarya
34	SMA 6 Tasikmalaya	34	SDN. Kaliastana
35	SMKN 2 Tasikmalaya	35	SDN. Padamamur
		36	SDN. Sukakarsa
		37	SDN. Gunungsari
		38	SDN. 4 Selasari
		39	SMPN 1 Campaka
		40	SMPN 3 SUKANAGARA
		41	SMPN 1 Sukanagara
		42	SMPN. 3 Pagelaran
		43	SMPN. 2 Cibinong
		44	SMPN. 3 Cikalong Kulon
		45	SMPN. 2 Mande
		46	SMPN. 1 Kadupandak
		47	SMP. PGRI 46 Cibinong
		48	SMA. Mardiyuana Cianjur
		49	SMKN. Cidaun

Sumber : Data Laporan Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dilingkungan Ditjen Mandikdasmen 2010, Kemdiknas

Universitas Indonesia

Karena luasnya populasi target, maka peneliti membatasi pada populasi survey secara proporsional, yakni 40% dari setiap kabupaten, sehingga diperoleh populasi survey untuk Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 14 sekolah dan Kabupaten Cianjur sebesar 18 sekolah, sehingga total ada 32 sekolah.

3.2.2 Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah guru/Kepala Sekolah/wakil sekolah yang memperoleh mandat dan mewakili sekolah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian setiap sekolah akan diwakili oleh seorang guru atau seorang kepala sekolah/wakil sekolah. Jenis sampel yang digunakan adalah sampel probabilita, dengan teknik penarikan sampel secara acak proporsional. Adapun jumlahnya adalah Kabupaten tasikmalaya diwakili oleh 14 orang dan Kabupaten Cianjur diwakili oleh 18 orang. Sehingga total responden adalah 32 orang.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam sebagai data primer. Kuesioner dibagikan secara langsung dan diisi sendiri oleh responden dengan didampingi oleh peneliti, untuk responden yang tidak hadir kuesioner dikirimkan ke alamat responden. Dan wawancara dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data dan mengetahui informasi lebih mendalam dari informan secara langsung. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, yaitu Pemerintah Pusat selaku penanggung jawab kegiatan program penanggulangan bencana di Direktorat Jenderal Dikdasmen; Pemerintah daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur; Tim Perencana/Pengawas Sekolah; dan Guru. Studi dokumen untuk data sekunder. Dokumentasi merupakan bagian yang dapat mendukung dalam proses mengungkapkan dan mendeskripsikan hasil penelitian. Data

Universitas Indonesia

dokumentasi adalah data-data berupa laporan lembaga resmi, buku-buku, literature, jurnal, internet dan hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan. Pada penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan data, yaitu menggabungkan kelompok data yang satu dengan yang lainnya sehingga data yang dianalisis berada dalam satu kesatuan dan disajikan dalam bentuk bagan-bagan atau tabel frekuensi.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui statistik deskriptif yang berupa tabel frekuensi dari masing-masing variabel dengan lima kriteria penilaian.

Tabel 5. kriteria penilaian.

No.	Kategori	Jumlah Skor	Rata-rata skor
1.	Sangat Baik/Jelas/Memadai	137 – 160	4,21 – 5,00
2.	Baik/Jelas/Memadai	110 – 136	3,41 – 4,20
3.	Cukup Baik/Jelas/Memadai	84 – 109	2,61 – 3,40
4.	Tidak Baik/Jelas/Memadai	58 – 83	1,81 – 2,60
5.	Sangat Tidak Baik/Jelas/Memadai	32 – 57	1 – 1,80

Sumber: Kepmen PAN NOMOR: KEP/25/M.PAN/2/2004

3.4 3.3 Obyek dan Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah sekolah-sekolah yang mendapatkan subsidi penanggulangan bencana di bidang pendidikan, yang
Universitas Indonesia

terkena dampak langsung bencana alam di Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 35 sekolah dan Kabupaten Cianjur yang berjumlah 49 sekolah di Provinsi Jawa Barat. Alasan dipilihnya sekolah di kedua daerah tersebut karena sekolah tersebut merupakan Sekolah yang kena dampak langsung dari bencana alam serta mendapatkan subsidi penanggulangan bencana dibidang pendidikan.

BAB IV

PROFIL PENANGGULANGAN BENCANA DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Pada bab ini membahas mengenai program penanggulangan bencana dibidang pendidikan; Pembangunan sekolah di wilayah bencana dan Pengelolaan Guru dan Siswa di Wilayah Bencana, serta profil wilayah Jawa Barat, Tasikmalaya dan Cianjur.

4.1 Program-Program Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan

Letak geografis Negara Indonesia dipandang dari sudut geologisnya merupakan daerah rawan terjadinya bencana geologi. Wilayah Indonesia terletak pada tiga lempeng tektonik di dunia, yaitu: lempeng Australia di selatan, lempeng Euro-Asia di barat dan lempeng Samudra Pasifik di timur yang dapat menunjang terjadinya sejumlah bencana. Berdasarkan posisi tersebut hamper seluruh wilayah Indonesia rawan terhadap bencana. Indonesia adalah negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera terbentang di garis khatulistiwa serta terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana.

Konsekuensinya, Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana alam seperti banjir musiman, kekeringan akut, tsunami , gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan. Alam yang kaya, jumlah penduduk yang banyak dengan penyebaran tidak merata serta ketimpangan sosial dan masalah penyimpangan pemanfaatan kekayaan alam dapat meningkatkan eskalasi dan macam bencana, tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia. Akibatnya, Indonesia juga menghadapi masalah lingkungan seperti kerusakan hutan, polusi air dari limbah industri, polusi air di perkotaan , dan asap akibat kebakaran hutan. Hampir semua jenis bencana baik ka rena alam maupun ulah manusia seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/bencana asap, dan bencana akibat kecelakaan industri serta kesalahan teknologi, telah mengancam

Universitas Indonesia

dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia. Selain itu dengan adanya kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang semakin parah dengan munculnya dampak negatif dari krisis multi dimensi yang berawal dari krisis moneter, sampai krisis ekonomi memicu berbagai konflik horizontal dan vertikal yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan sosial yang berdampak arus pengungsian warga masyarakat dengan berbagai masalahnya. Pada hakekatnya bencana oleh karena alam dan karena ulah manusia serta dampak kerusuhan yang mengakibatkan pengungsian merupakan bencana bagi bangsa Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa selama tahun 2008 di Indonesia terjadi 343 kejadian bencana alam, yang diawali oleh banjir (58%), disusul oleh angin topan 16%), tanah longsor (12%), banjir dan tanah longsor (7%), gelombang pasang dan abrasi 2%), gempa bumi (2%), kebakaran (2%), kebakaran hutan dan lahan (0,3%), dan letusan gunung berapi (0,3%).³ Dari seluruh kejadian tersebut, korban meninggal dan hilang akibat bencana alam sebanyak 245 jiwa yang dimulai dengan tanah longsor (73 jiwa), banjir (68 jiwa), banjir dan tanah longsor (54 jiwa), gempa bumi (12 jiwa), kebakaran (32 jiwa), dan angin topan (3 jiwa).

Sementara itu, korban yang menderita dan mengungsi akibat bencana alam selama tahun 2008 sebanyak 647.281 jiwa. Korban terbesar adalah banjir (587.190 jiwa), disusul oleh gempa bumi (24.002 jiwa), banjir dan tanah longsor (15.915 jiwa), letusan gunung berapi (9.708 jiwa), gelombang pasang atau abrasi (3.911 jiwa), angin topan (2.564 jiwa), kebakaran (2.392 jiwa), dan tanah longsor (1.599 jiwa).⁵ Selama tahun 2008 pula, total rumah rusak akibat bencana alam sebanyak 34.412 unit, yang diawali oleh banjir (20.046 unit), gempa bumi (8.254 unit), angin topan (2.574 unit), banjir dan tanah longsor (1.396 unit), gelombang pasang atau abrasi (1.063 unit), tanah longsor (681 unit), dan kebakaran (396 unit). Dilihat dari potensi bahaya yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (*hazard potency*) yang sangat tinggi. Beberapa potensi tersebut antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, tanah longsor, angin topan, serta kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu potensi bahaya utama (*main hazard potency*) dan potensi

bahaya ikutan (*collateral hazard potency*). Potensi bahaya utama dapat dilihat pada peta potensi bahaya gempa bumi di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona yang rawan gempa bumi, peta potensi bencana tanah longsor, peta potensi bencana letusan gunung berapi, peta potensi bencana tsunami dan peta potensi bencana banjir. Indikator-indikator tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi bahaya utama yang tinggi.

Sementara itu, potensi bahaya ikutan yang sangat tinggi juga dimiliki oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti persentase bangunan yang terbuat dari kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya ikutan ini sangat tinggi terutama di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, persentase bangunan dari kayu yang umumnya di daerah kumuh perkotaan, dan jumlah industri berbahaya yang tinggi. Dengan indikator-indikator tersebut, maka perkotaan di Indonesia merupakan wilayah dengan potensi bencana yang sangat tinggi. Disamping dampak terhadap infrastruktur fisik dan bangunan, bencana alam juga menyebabkan dampak kerugian yang sangat besar bagi umat manusia sebagai korbannya. Setiap muncul bencana alam, korban berupa perempuan, anak-anak, dan lansia merupakan pihak-pihak yang paling menderita karena posisi mereka menjadi lebih rentan pada periode pasca bencana. Kerentanan (*vulnerability*) kaum perempuan ini karena mereka semakin lemah fisiknya, mendapatkan tekanan seksual; dan kekerasan domestik yang menjadikan perempuan sebagai korban, yang umumnya muncul pada periode pasca bencana alam. Peran perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga menjadikan mereka tersingkir dari wilayah yang aman pasca bencana yang menghasilkan situasi dimana ketika kaum laki-laki mampu menyelamatkan diri ke tempat yang aman, namun kaum perempuan dan anak-anak justru menjadi korban. Perempuan juga kurang memiliki akses terhadap sumber daya seperti jaringan sosial dan pengaruhnya, transportasi, informasi, dan keahlian, yang sangat dibutuhkan untuk beradaptasi pada pasca bencana alam. pasca bencana alam membuat anak-anak menjadi semakin rentan karena beragam alasan. Kerentanan (*vulnerability*) anak-anak pada periode pasca

bencana karena kondisi berikut. *Pertama*, anak-anak menjadi rentan karena munculnya penyakit, kekurangan gizi, dan cedera fisik pasca bencana alam. *Kedua*, anak-anak masih menjadi tanggung jawab orang tuanya, mereka memerlukan dukungan orang dewasa tidak hanya agar bisa bertahan menghadapi bencana alam namun juga setiap tahun masa pertumbuhannya untuk memenuhi kebutuhan psikologis dan kesejahteraannya. *Ketiga*, anak-anak berada dalam masa pertumbuhan, yang tumbuh kembang secara berkala, seperti menara batu bata, dimana pada tiap tingkatan tergantung pada kekuatan dibawahnya. Hal serupa terjadi pada anak-anak, apabila terjadi keterlambatan dalam proses tumbuh kembangnya; maka akan mempengaruhi seluruh proses tumbuh kembangnya.

Kerusakan dan kehilangan sebagai dampak langsung dari bencana akan berpengaruh kepada sarana dan prasarana yang ada diberbagai sector dan akan sangat mempengaruhi terhadap kehidupan social, ekonomi dan budaya masyarakat. Salah satu sector penting yang akan berpengaruh akibat bencana adalah sector pendidikan. Pada sector pendidikan, kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh bencana akan menyangkut fasilitas fisik (sarana dan prasarana) serta keberadaan siswa dan guru. Permasalahan ini akan berpengaruh pada proses belajar yang berakibat fatal terhadap kelangsungan proses pendidikan. Selain itu bencana akan berakibat adanya gangguan psikologis bagi guru dan siswa yang dalam jangka panjang akan berdampak buruk terhadap sikap mental mereka di masa depan.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dikatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya adalah Pengurangan risiko bencana dan pemuatannya dengan program pembangunan. Sedangkan Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b undang-undang yang sama, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana yang meliputi: pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;

Universitas Indonesia

pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap perilaku penanggulangan bencana; dan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Salah satu wujud penerapan dari pengurangan resiko bahaya adalah dibentuknya Sekolah Siaga Bencana atau SSB. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2003, menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimandatkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain; sekolah adalah tempat pendidikan bagi anak-anak bangsa. Dan anak-anak merupakan bagian kelompok yang sangat rentan bencana. Akibat bencana, pendidikan anak-anak menjadi terlantar, terlebih lagi kita belum memiliki metode pendidikan yang standar yang bisa diterapkan pada kondisi pasca bencana. Sekalipun ada, belum tersosialisasikan dengan baik. Karena itulah diperlukan pendidikan yang berbasis krisis sebagai acuan bagi guru untuk melakukan model pembelajaran yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Disisi lain, Sekolah adalah pusat belajar dan pusat keunggulan yang memiliki sistem baku. Melalui sekolah cikal bakal lahirnya generasi yang sadar akan budaya keselamatan. Di sekolah juga sering dijadikan sebagai tempat evakuasi aman sementara pada saat bencana. Serta nuansa pembelajaran penanggulangan risiko bencana di sekolah bisa menjadi investasi masa depan dalam menyelamatkan manusia dari ancaman bencana.

Berdasarkan Surat Edaran MENDIKNAS No. 70a/SE/MPN/2010 mengenai Pengarusutamaan penanggulangan risiko bencana di Sekolah menghimbau

Universitas Indonesia

kepada para Gubernur, Walikota dan Bupati di Seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di Sekolah melalui 3 hal yaitu: pemberdayaan peran kelembagaan dan kemampuan komunitas sekolah, pengintegrasian penanggulangan risiko bencana ke dalam kurikulum satuan pendidikan formal, baik intra maupun ekstra kurikuler; membangun kemitraan dan jaringan antar pihak untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan risiko bencana di sekolah.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di sekolah ini mengacu pada pedoman yang telah disusun oleh Pusat Kurikulum berupa 15 modul ajar dan 1 modul pelatihan pengintegrasian penanggulangan risiko bencana ke dalam system pendidikan. 15 modul ajar tersebut terdiri atas modul ajar untuk guru SD, SMP dan SMA yang mencakup 5 topik ancaman bencana yaitu Gempa, Tsunami, Longsor, Kebakaran dan Banjir; yang berisi cara-cara untuk menyusun silabus dan indicator serta model ajar dalam pengintegrasian PRB ke mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler.

Penanggulangan risiko bencana berbasis sekolah bertujuan untuk menciptakan sekolah yang aman bencana. sehingga anak-anak akan tetap bisa menikmati haknya akan pendidikan. Sekolah yang aman dapat di artikan banyak hal; komunitas sekolah yang mengenali resiko bencana di lingkungannya, sekolah yang menerapkan prosedur keselamatan, bangunan sekolah yang dirancang memperhitungkan resiko bencana, komunitas sekolah yang secara berkala berlatih siaga bencana.

Sekolah aman adalah sekolah yang Siaga Bencana, tujuannya antara lain: Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik tentang adanya risiko bencana yang ada di lingkungannya, berbagai macam jenis bencana, dan cara-cara mengantisipasi/mengurangi risiko yang ditimbulkannya; Memberikan keterampilan agar peserta didik mampu berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana baik pada diri sendiri dan lingkungannya; memberikan bekal sikap mental yang positif tentang potensi bencana dan risiko yang mungkin ditimbulkan; Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bencana di Indonesia kepada siswa sejak dini; memberikan pemahaman kepada guru tentang bencana, dampak bencana, penyelamatan diri bila terjadi bencana;

memberikan keterampilan kepada guru dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan melakukan pendidikan bencana kepada siswa; memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi pihak terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pembelajaran tentang bencana.

Agar penanggulangan risiko bencana disekolah dapat segera diselenggarakan, perlu diadakan pelatihan bagi guru-guru dan tim pengembang kurikulum di tingkat nasional dan lokal. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan memberdayakan peran komunitas sekolah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah. Dalam pelatihan itu para peserta akan mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai cara mengintegrasikan pengetahuan penanggulangan risiko bencana ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ekstra kurikuler; menyusun rencana aksi sekolah tentang penanggulangan risiko bencana; cara mengidentifikasi risiko bencana, ancaman, kerentanan dan kapasitas sekolah; serta melakukan analisis konteks untuk mengidentifikasi stakeholders yang dapat membantu dalam memobilisasi sumberdaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan sekolah. Pelatihan ini diharapkan dapat mencetak para fasilitator atau pelatih yang dapat menyebarkan ilmu, pengetahuan dan ketrampilan tersebut kepada guru-guru dan komunitas sekolah lainnya di lingkungannya masing-masing.

4.1.1 Pembangunan Sekolah Wilayah Bencana

Pembangunan sekolah di wilayah bencana harus menjadi perhatian utama untuk suatu Negara yang rawan bencana. Upaya ini sekaligus sebagai mitigasi dalam bentuk mitigasi structural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana. Langkah ini antara lain membuat kode bangunan untuk setiap jenis perkuatan struktur, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor dan lain-lain. Upaya lain adalah dalam konteks mitigasi non structural diantaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat

diketahui melalui rencana tata ruang atau tata guna lahan serta dengan memberdayakan masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pembangunan sekolah di wilayah bencana yang merupakan langkah mitigasi structural ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1). Wilayah bencana banjir dan bahaya air; adanya desain struktur bangunan terutama pada komponen pondasi, sloof beton, kolom beton dan dinding untuk menahan kekuatan banjir serta rancangan lantai yang ditinggikan; titik nol (0) bangunan harus dibuat di atas elevasi jalan sesuai dengan kebutuhan; konstruksi tahan rembesan dengan mengikuti kaedah teknis; drainase lingkungan sekolah harus dibuat dengan baik dan memperhatikan saluran pelepasan. 2) wilayah rawan gempa bumi; konstruksi harus menggunakan standar teknis bangunan tahan gempa; memperkuat bangunan yang ada; dan rekayasa bangunan untuk menahan kekuatan getaran. 3). Wilayah rawan letusan gunung berapi; hindari membangun sekolah pada tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava dan/atau lahar; rekayasa bangunan untuk menambah beban tambahan. 4). Wilayah rawan instabilitas tanah; menghindari pembangunan sekolah di tempat-tempat yang cenderung terjadinya longsor; rekayasa bangunan untuk menahan potensi gerakan tanah; pondasi tiang pancang atau sumuran untuk mengantisipasi getaran bangunan. 5). Wilayah rawan angin kencang; konstruksi bangunan untuk menahan kekuatan angin; penyediaan bangunan keamanan angin. 6). Wilayah rawan tsunami; pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko; hindari pembangunan pada daerah yang berisiko tsunami. 7) Wilayah rawan bahaya-bahaya teknologi; membangun sekolah yang mempunyai jarak minimal tertentu dengan sarana teknologi; diperlukan halaman yang cukup luas dan menanam pepohonan; membangun sekolah dengan system sirkulasi udara yang cukup.

Pembangunan atau rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan yang rusak akibat gempa dilakukan baik kategori sedang, berat ataupun rusak total. Untuk sekolah yang kondisi rusak berat atau total akan diperbaiki secara total/dibangun kembali sehingga layak dan aman untuk digunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Sedangkan yang rusak sedang direhabilitasi sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan teknis dan anggaran biaya

rahabilitasi gedung sekolah dilakukan oleh tim perencana dan pengawas pada pelaksanaan rehabilitasi gedung maupun pembangunan sekolah.

4.1.2 Pengelolaan Guru dan Siswa di Wilayah Bencana

Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa adanya peringatan serta memandang waktu dan jenis korban. Misalnya terjadi gempa bumi, banjir atau tanah longsor. Pada saat terjadinya bencana tersebut sangat dimungkinkan terjadinya korban meninggal atau luka-luka. Korban ini sering diakibatkan oleh sarana di sekitarnya, antara lain: terkena jatuhnya benda-benda berbahaya, tertimpa reruntuhan bangunan akibat getaran atau terkena aliran listrik.

Apabila bencana terjadi pada waktu jam belajar, sangat memungkinkan guru dan siswa menjadi salah satu korban bencana tersebut. Seluruh personel satuan pendidikan akan panic karena kejadian tersebut. Khususnya apabila terjadinya gempa, dimungkinkan beberapa alat belajar maupun beberapa meja dan kursih akan bergerak akibat getaran, dan dikhawatirkan adanya barang-barang yang berjatuhan.

Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya yang mengarah pada pengelolaan guru dan siswa yang bersifat preventif, agar guru dan siswa dapat melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat pada tahan pra-bencana, pada saat terjadinya bencana maupun pasca bencana. Dengan melakukan pemberdayaan kepada personel sekolah, diharapkan dapat membantu melakukan mitigasi serta mengurangi dampak bencana pada dirinya maupun lingkungannya.

Pengelolaan guru dan siswa di wilayah bencana penting dan hal ini perlu dilakukan suatu langkah pemahaman khusus agar lebih mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Untuk dapat meningkatkan kepedulian, kemampuan dan kesiapan serta menyiapkan sekolah untuk pendidik maupun peserta didik perlu dilakukan pelatihan yang aplikatif. Dengan program ini diharapkan bermanfaat bagi sekolah di wilayah bencana untuk menyiapkan dan menjalankan program keselamatan sekolah.

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka pengelolaan guru dan siswa di wilayah bencana, sebagai berikut: pengenalan bencana baik yang sering terjadi di wilayahnya maupun jenis bencana alam lainnya: pengenalan

terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan akibat bencana; pengenalan lingkungan sekolah yang berpotensi berbahaya, rentan, dan kemampuan berbagai jenis bencana; pencarian benda dan tempat berbahaya bagi manusia pada saat terjadinya bencana dalam kelas dan lingkungan kelas; pengenalan pembuatan peta bencana yang memungkinkan terjadi dalam kelas dan lingkungan sekolah; melakukan simulasi bencana; pengenalan terhadap penempatan barang-barang dan alat belajar untuk mengantisipasi terjadinya bencana; dan pembuatan peta evakuasi.

4.2 Profil Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat, secara geografis, terletak pada posisi $5^{\circ}50'$ - $7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ}48'$ - $108^{\circ}48'$ Bujur Timur, dengan batas wilayah : sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta; sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah; sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten.

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat meliputi wilayah daratan seluas 3.710.061,32 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Daratan Jawa Barat dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam (9,5% dari total luas wilayah Jawa Barat) terletak di bagian Selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut (dpl); wilayah lereng bukit yang landai (36,48%) terletak di bagian Tengah dengan ketinggian 10 - 1.500 m dpl; dan wilayah dataran luas (54,03%) terletak di bagian Utara dengan ketinggian 0 - 10 m dpl. Tutupan lahan terluas di Jawa Barat berupa kebun campuran (22,89 % dari luas wilayah Jawa Barat), sawah (20,27%), dan perkebunan (17,41%), sementara hutan primer dan hutan sekunder di Jawa Barat hanya 15,93% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat.

Iklim di Jawa Barat yaitu tropis, dengan suhu rata-rata berkisar antara $17,4 - 30,7^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban udara antara 73–84%. Data BMKG menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2008, turun hujan selama 1-26 hari setiap bulannya dengan curah hujan antara 3,6 hingga 332,8 mm.

Jawa Barat dialiri 40 sungai dengan wilayah seluas 32.075,15 km². Jawa Barat juga memiliki 1.267 waduk/situ dengan potensi air permukaan lebih dari 10.000 juta m³. Air permukaan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, pertanian, dan air minum. Terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang aktif memanfaatkan air permukaan menjadi 625 perusahaan dari 606 perusahaan pada tahun 2007.

Luas Wilayah Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	
		Daratan	Garis Pantai
		(Ha)	Km *)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kab. Bogor	297.646,55	0,00
2	Kab. Sukabumi	416.173,50	117,00
3	Kab. Cianjur	361.435,53	75,00
4	Kab. Bandung	172.663,29	0,00
5	Kab. Garut	311.007,54	72,00
6	Kab. Tasikmalaya	270.969,75	52,53
7	Kab. Ciamis	273.250,99	91,00
8	Kab. Kuningan	121.501,01	0,00
9	Kab. Cirebon	107.195,89	-
10	Kab. Majalengka	130.938,55	0,00
11	Kab. Sumedang	156.343,87	0,00
12	Kab. Indramayu	210.158,70	114,00
13	Kab. Subang	217.438,68	48,20
14	Kab. Purwakarta	99.400,40	0,00
15	Kab. Karawang	191.898,80	57,00
16	Kab. Bekasi	126.470,86	-
17	Kab. Bandung Barat	129.601,10	0,00
18	Kota Bogor	11.770,99	0,00
19	Kota Sukabumi	4.883,85	0,00
20	Kota Bandung	17.243,90	0,00
21	Kota Cirebon	3.899,14	-
22	Kota Bekasi	21.564,83	0,00
23	Kota Depok	20.277,21	0,00
24	Kota Cimahi	4.445,46	0,00
25	Kota Tasikmalaya	18.498,19	0,00

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	
		Daratan	Garis Pantai
		(Ha)	Km *)
26	Kota Banjar	13.382,72	0,00
	Jawa Barat	3.710.061,32	755,83

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007 (Pemutakhiran Batas Administrasi Jawa Barat 2005 Berdasarkan Peta Dasar Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000)

Ket : *) Data bersumber dari Kabupaten/Kota

-) Tidak ada data

Luas Kemiringan Lereng Di Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lereng (Ha)				
		< 8%	8 - 15%	16 - 25%	26 - 40%	> 40%
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Bogor	156.776,2	58.331,2	46.476,6	29.952,3	2.274,9
2	Kab. Sukabumi	152.514,3	126.224,0	93.742,1	41.716,0	2.121,5
3	Kab. Cianjur	116.873,2	97.449,4	96.371,8	48.276,2	2.789,7
4	Kab. Bandung	64.462,4	35.710,0	47.656,0	23.781,1	1.397,5
5	Kab. Garut	76.160,9	74.513,0	99.014,6	58.643,6	2.995,5
6	Kab. Tasikmalaya	93.658,0	79.919,3	71.724,9	24.384,0	1.602,9
7	Kab. Ciamis	133.080,7	76.300,1	49.114,8	13.972,9	925,2
8	Kab. Kuningan	56.220,9	23.267,4	24.284,5	16.607,3	1.021,0
9	Kab. Cirebon	100.570,5	4.679,6	1.018,7	875,3	141,7
10	Kab. Majalengka	90.265,8	19.700,4	14.903,4	6.128,1	282,1
11	Kab. Sumedang	59.762,7	45.206,5	17.164,6	33.926,7	621,4
12	Kab. Indramayu	209.014,6	1.054,6	396,9	15,4	0,0
13	Kab. Subang	176.765,1	18.712,9	11.131,5	9.766,8	1.384,4
14	Kab. Purwakarta	59.768,0	23.907,9	10.070,7	5.353,8	641,2
15	Kab. Karawang	183.099,4	3.819,1	2.493,6	2.667,1	147,3
16	Kab. Bekasi	126.052,2	166,3	0,0	2,6	0,0
17	Kab. Bandung Barat	43.610,8	31.480,3	37.301,2	16.779,2	771,9
18	Kota Bogor	11.478,2	592,1	42,4	0,0	0,0
19	Kota Sukabumi	5.038,1	159,8	28,0	0,1	0,0
20	Kota Bandung	16.122,9	1.135,6	316,8	10,5	0,0
21	Kota Cirebon	4.162,5	70,4	7,0	0,0	0,0
22	Kota Bekasi	19.700,9	7,4	0,0	0,0	0,0
23	Kota Depok	19.769,2	146,9	0,0	0,0	0,0

Universitas Indonesia

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lereng (Ha)				
		< 8%	8 - 15%	16 - 25%	26 - 40%	> 40%
24	Kota Cimahi	4.064,2	381,2	277,4	65,0	0,0
25	Kota Tasikmalaya	15.345,6	2.957,2	535,6	2,5	0,0
26	Kota Banjar	10.303,4	1.977,8	1.327,0	104,8	0,0
	Jawa Barat	2.004.641,3	727.870,4	625.400,1	333.031,3	19.118,2

Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, 2007 (data kelas lereng diturunkan dari data kontur topografi Rupabumi Indonesia Skala 1 : 25.000)

4.3. Profil Kabupaten Tasikmalaya

Kabupaten Tasikmalaya merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Indonesia. Terletak di tenggara daerah Priangan, Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling besar dan berperan penting di wilayah Priangan Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama pertanian dan kehutanan, sementara petani menetap sebagai mayoritas penduduk. Kabupaten Tasikmalaya terkenal akan produksi Kerajinannya, Salak, Kabupaten Tasikmalaya juga dikenal sebagai pusat keagamaan besar di Jawa Barat.

4.3.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tasikmalaya

Dimulai pada abad ke VII sampai abad ke XII di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Tasikmalaya, diketahui adanya suatu bentuk Pemerintahan Kebataraan dengan pusat pemerintahannya di sekitar Galunggung, dengan kekuasaan mengabisheka raja-raja (dari Kerajaan Galuh) atau dengan kata lain raja baru dianggap syah bila mendapat persetujuan Batara yang bertahta di Galunggung. Batara atau sesepuh yang memerintah pada masa abad tersebut adalah sang Batara Semplakwaja, Batara Kunci Putih, Batara Kawindu, Batara Wastuhayu, dan Batari Hyang yang pada masa pemerintahannya mengalami perubahan bentuk dari kebataraan menjadi kerajaan.

Kerajaan ini bernama Kerajaan Galunggung yang berdiri pada tanggal 13 Bhadrapada 1033 Saka atau 21 Agustus 1111 dengan penguasa pertamanya yaitu Batari Hyang, berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang ditemukan di

bukit Geger Hanjuang, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Tasikmalaya. Dari Sang Batari inilah mengemuka ajarannya yang dikenal sebagai Sang Hyang Siksakanda ng Karesian. Ajarannya ini masih dijadikan ajaran resmi pada jaman Prabu Siliwangi (1482-1521 M) yang bertahta di Pakuan Pajajaran. Kerajaan Galunggung ini bertahan sampai 6 raja berikutnya yang masih keturunan Batari Hyang.

Periode selanjutnya adalah periode pemerintahan di Sukakerta dengan Ibukota di Dayeuh Tengah (sekarang termasuk dalam Kecamatan Salopa, Tasikmalaya), yang merupakan salah satu daerah bawahan dari Kerajaan Pajajaran. Penguasa pertama adalah Sri Gading Anteg yang masa hidupnya sejaman dengan Prabu Siliwangi. Dalem Sukakerta sebagai penerus tahta diperkirakan sejaman dengan Prabu Surawisesa (1521-1535 M) Raja Pajajaran yang menggantikan Prabu Siliwangi.

Pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa kedudukan Pajajaran sudah mulai terdesak oleh gerakan kerajaan Islam yang dipelopori oleh Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati sejak tahun 1528 berkeliling ke seluruh wilayah tanah Sunda untuk mengajarkan Agama Islam. Ketika Pajajaran mulai lemah, daerah-daerah kekuasaannya terutama yang terletak di bagian timur berusaha melepaskan diri. Mungkin sekali Dalem Sukakerta atau Dalem Sentawoan sudah menjadi penguasa Sukakerta yang merdeka, lepas dari Pajajaran. Tidak mustahil pula kedua penguasa itu sudah masuk Islam.

Periode selanjutnya adalah pemerintahan di Sukapura yang didahului oleh masa pergolakan di wilayah Priangan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun. Munculnya pergolakan ini sebagai akibat persaingan tiga kekuatan besar di Pulau Jawa pada awal abad XVII Masehi: Mataram, Banten, dan VOC yang berkedudukan di Batavia. Wirawangsa sebagai penguasa Sukakerta kemudian diangkat menjadi Bupati daerah Sukapura, dengan gelar Wiradadaha I, sebagai hadiah dari Sultan Agung Mataram atas jasa-jasanya membasmi pemberontakan Dipati Ukur. Ibukota negeri yang awalnya di Dayeuh Tengah, kemudian dipindah ke Leuwiloa Sukaraja dan “negara” disebut “Sukapura”.

Pada masa pemerintahan R.T. Surialaga (1813-1814) ibukota Kabupaten Sukapura dipindahkan ke Tasikmalaya. Kemudian pada masa

pemerintahan Wiradadaha VIII ibukota dipindahkan ke Manonjaya (1832). Perpindahan ibukota ini dengan alasan untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan Belanda dalam menghadapi Diponegoro. Pada tanggal 1 Oktober 1901 ibukota Sukapura dipindahkan kembali ke Tasikmalaya. Latar belakang pemindahan ini cenderung berdasarkan alasan ekonomis bagi kepentingan Belanda. Pada waktu itu daerah Galunggung yang subur menjadi penghasil kopi dan nila. Sebelum diekspor melalui Batavia terlebih dahulu dikumpulkan di suatu tempat, biasanya di ibukota daerah. Letak Manonjaya kurang memenuhi untuk dijadikan tempat pengumpulan hasil-hasil perkebunan yang ada di Galunggung. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913 diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A Wiratanuningrat (1908-1937) sebagai Bupati. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan Hari Jadi Tasikmalaya berdasarkan Prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara pentasbihan atau penobatan Batari Hyang sebagai Penguasa di Galunggung.

4.3.2 Kondisi Geografis Kabupaten Tasikmalaya

Kondisi fisik dasar Kabupaten Tasikmalaya secara geografis terletak antara $7^{\circ}02'29''$ - $7^{\circ}49'08''$ Lintang Selatan dan $107^{\circ}54'10''$ - $108^{\circ}26'42''$ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tasikmalaya, dan Kab. Ciamis;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Garut; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.

Kabupaten Tasikmalaya mempunyai luas wilayah sebesar 2.708,81 km² atau 270.881 ha, secara administratif terdiri dari 39 Kecamatan, 351 desa. Tiga kecamatan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah pesisir dan lautan yaitu Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Karangnunggal, dengan panjang garis pantai 56 km.

Wilayah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ketinggian berkisar antara 0 – 2.500 meter di atas permukaan laut (dpl). Secara umum wilayah tersebut dapat dibedakan menurut ketinggiannya, yaitu : bagian Utara merupakan wilayah dataran tinggi dan bagian Selatan merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0 – 100 meter dpl.

Kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Tasikmalaya berturut-turut yaitu: Sangat Curam (> 40 %) sebesar 1,39 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya, Agak Curam (15 % - 40 %) sebesar 25,35 %, Curam (5 % - 15 %) sebesar 27,11 %, Landai (2 % - 5 %) sebesar 13,27 %, dan Datar (0 % - 2 %) sebesar 32,87 % dari luas Kabupaten Tasikmalaya. Dari data kemiringan lahan terlihat bahwa sebagian besar bentang alam Kabupaten Tasikmalaya didominasi oleh bentuk permukaan datar sampai dengan agak curam, dengan kondisi kemiringan lahan tersebut kurang menguntungkan untuk pengembangan prasarana dan sarana wilayah.

Kondisi hidrologi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari Daerah Aliran sungai-besar dan sungai kecil yang merupakan bagian dari sistem drainase yang dipengaruhi oleh kondisi topografi dan struktur fisiografinya di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 6 daerah aliran sungai besar atau sungai utama, yaitu Sungai Cilangla, Cimedang, Cisanggiri, Cipatujah, Citanduy, dan Sungai Ciwulan. Pola aliran daerah aliran sungai umumnya berpola radial, karena lebih dipengaruhi dominansi vulkanik. Pada daerah tektonik pola aliran berubah menjadi tidak teratur (irregular), tergantung pada bentuk dan arah proses tektonik yang terjadi.

4.3.3 Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

Visi Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025 adalah :

"Kabupaten Tasikmalaya Yang Religius / Islami, Maju dan Sejahtera Tahun 2025".

Misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berkualitas dan mandiri
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis keunggulan agribisnis

Universitas Indonesia

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance)
4. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Lebih Merata dengan memperhatikan Aspek Lingkungan yang Asri dan Lestari

4.3.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 berjumlah 1.675.554 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 637 jiwa/Km². Pada tahun 2010, penduduk laki-laki sebanyak 835.052 jiwa dan perempuan sebanyak 840.492 jiwa. Adanya sedikit perbedaan jumlah penduduk antara tahun 2010 dan 2009 dikarenakan jumlah penduduk tahun 2009 didapatkan dari proyeksi hasil Sensus Penduduk tahun 2000.

Menurut kelompok umur, pada tahun 2006 hingga 2010 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan, penduduk Kabupaten Tasikmalaya didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya tercerminkan dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat dari tahun 2006 sampai 2010.

Demikian juga indikator makro lain yang merupakan keberhasilan pembangunan daerah yang meliputi, laju pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk miskin, PDRB/PDRB perkapita, dan pengangguran terbuka, angkanya semakin membaik dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 915.948 orang yang bekerja di berbagai sektor. Tiga terbesar pekerjaan yaitu : petani sebanyak 318.866 orang atau 34,81%; buruh tani sebanyak 275.559 orang atau 30,08%; dan buruh swasta sebanyak 97.712 orang atau 10,67%. Dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 sebanyak 376.045 jiwa (21,75%), kemungkinan besar berprofesi sebagai buruh tani. Karena buruh tani sangat rentan terhadap gejolak ekonomi yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk mengakses pangan, layanan pendidikan dan kesehatan.

Juga kategori keluarga miskin menurut BPS sangat cocok dengan keadaan buruh tani di lapangan. Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Jumlah pemuda (penduduk usia 15-34 tahun) pada tahun 2009 di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 549.789 jiwa atau 31,83% dari jumlah penduduk. Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, diperlukan berbagai wadah untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya.

4.4 Profil Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Cianjur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di utara, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Sukabumi di barat.

4.4.1 Sejarah Kabupaten Cianjur

Cianjur memiliki filosofi yang sangat bagus, yakni ngaos, mamaos dan maenpo yang mengingatkan tentang 3 (tiga) aspek keparipurnaan hidup. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur dengan masyarakat yang dilekati dengan ke beragamaan. Citra sebagai daerah agamis ini konon sudah terintis sejak Cianjur ada dari ketiadaan yakni sekitar tahun 1677 dimana tatar Cianjur ini dibangun oleh para ulama dan santri tempo dulu yang gencar mengembangkan syiar Islam. Itulah sebabnya Cianjur juga sempat mendapat julukan gudang santri dan kyai. Bila di tengok sekilas sejarah perjuangan di tatar Cianjur jauh sebelum masa perang kemerdekaan, bahwa kekuatan-kekuatan perjuangan kemerdekaan pada masa itu tumbuh dan bergolak pula di pondok-pondok pesantren. Banyak pejuang-pejuang yang meminta restu para kyai sebelum berangkat ke medan perang. Mereka baru merasakan lengkap dan percaya diri berangkat ke medan juang setelah

Universitas Indonesia

mendapat restu para kyai. Mamaos adalah seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni mamaos tembang sunda Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Aria Adipati Kusumahningrat yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti. Ia menjadi pupuhu (pemimpin) tatar Cianjur sekitar tahun 1834-1862.

Seni mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung (Kecapi besar dan Kecapi rincik (kecapi kecil) serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair mamaos ini lebih banyak mengungkapkan pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaanNya. Sedangkan Maenpo adalah seni diri pencak silat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta dan penyebar maenpo ini adalah R. Djadjaperbata atau dikenal dengan nama R. H. Ibrahim aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Dalam maenpo dikenal ilmu Liliwatan (penghindaran) dan Peupeuhan (pukulan).

Apabila filosofi tersebut diresapi, pada hakekatnya merupakan symbol rasa keber-agama-an, kebudayaan dan kerja keras. Dengan keber-agama-an sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya keimanan dan ketaqwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia. Dengan kebudayaan, masyarakat cianjur ingin mempertahankan keberadaannya sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki adab, tatakrma dan sopan santun dalam tata pergaulan hidup. Dengan kerja keras sebagai implementasi dari filosofi maenpo, masyarakat Cianjur selalu menunjukkan semangat keberdayaan yang tinggi dalam meningkatkan mutu kehidupan. Liliwatan, tidak semata-mata permainan beladiri dalam pencak silat, tetapi juga ditafsirkan sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang maksiat. Sedangkan peupeuhan atau pukulan ditafsirkan sebagai kekuatan didalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup.

4.4.2. Kondisi Fisik Kabupaten Cianjur

Luas wilayah Kabupaten Cianjur 350.148 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 2.138.465 jiwa. Lapangan pekerjaan utama penduduk Kabupaten Cianjur di sektor pertanian yaitu sekitar 52,00 %. Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan yaitu sekitar 23,00 %. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Cianjur yaitu sekitar 42,80 % disusul sektor perdagangan sekitar 24,62%.

Secara administratif Pemerintah kabupaten Cianjur terbagi dalam 32 Kecamatan, dengan batas-batas administratif :

1. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.
2. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.

Secara geografis , Kabupaten Cianjur dapat dibedakan dalam tiga wilayah pembangunan yakni wilayah utara, tengah dan wilayah selatan.

1. Wilayah Utara

Meliputi 16 Kecamatan : Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang , Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi.

2. Wilayah Tengah

Meliputi 9 Kecamatan : Sukanagara, Takokak, Campaka, Campaka Mulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak.

3. Wilayah Selatan

Meliputi 7 Kecamatan : Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun , Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda.

Sebagaimana daerah beriklim tropis, maka di wilayah Cianjur utara tumbuh subur tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan.

Sedangkan di wilayah Cianjur Selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur Selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi. Sebagai daerah agraris yang pembangunannya bertumpu pada sektor pertanian, kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah swasembada padi. Produksi padi pertahun sekitar 625.000 ton dan dari jumlah sebesar itu telah dikurangi kebutuhan konsumsi lokal dan benih, masih memperoleh surplus padi sekitar 40 %. Produksi pertanian padi terdapat hampir di seluruh wilayah Cianjur.

Kecuali di Kecamatan Pacet dan Sukanagara. Di kedua Kecamatan ini, didominasi oleh tanaman sayuran dan tanaman hias. Dari wilayah ini pula setiap hari belasan ton sayur mayur dipasok ke Jabotabek. Pengembangan usaha perikanan air tawar dan laut di Kabupaten Cianjur cukup potensial. Baik untuk usaha berskala kecil maupun besar. Beberapa faktor pendukungnya adalah: jumlah penduduk yang relatif besar serta tersedianya lahan budi daya ikan air tawar dan ikan laut. Usaha pertambakan ikan dan penangkapan ikan laut memiliki peluang besar di wilayah Cianjur selatan, khususnya di sepanjang pantai Cidaun hingga Agrabinta. Di wilayah ini, mulai dirintis dan dikembangkan pertambakan budi daya udang. Sedangkan budi daya ikan tawar terbuka luas di cianjur utara dan cianjur tengah. Di wilayah ini terdapat budi daya ikan hias, pembenihan ikan, mina padi, kolam air deras dan keramba serta usaha jaring terapung di danau Cirata, yang sekaligus merupakan salah satu obyek wisata yang mulai berkembang.

Sementara itu , potensi perkebunan di Kabupaten Cianjur cukup besar dimana sekitar 19,4 % dari seluruh luas merupakan areal perkebunan . Selama ini dikelola oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 10.709 hektar, Perkebunan Besar Swasta (PBS) sekitar 20.174 hektar dan Perkebunan Rakyat (PR) seluas 37.167 hektar. Peningkatan produksi perkebunan, terutama komoditi teh cukup baik. Produktivitas teh rakyat mampu mencapai antara 1.400 - 1.500 kg teh kering per hektar. Sedangkan yang di kelola oleh perkebunan besar rata-rata mencapai di atas 2.000 kg per hektar.

4.5 Bencana Alam di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah rawan bencana alam di Indonesia. Terdapat 15 kabupaten/kota yang selalu menjadi langganan banjir dan tanah longsor. Daerah rawan banjir di Jawa Barat diantaranya, daerah Karawang, Indramayu, Ciamis, dan Kab. Bandung. Sedangkan daerah yang rawan longsor, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kab. Ciamis, Kab. Sumedang, Kab. Sukabumi, Kab./Kota Bogor, dan Kab. Purwakarta.

Selain itu, Jawa Barat pun rentan terhadap gempa bumi. Misalnya, gempa bumi terjadi pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 pada pukul 14.55 wib dengan kekuatan 7,4 Skala Richter dengan pusat gempa berada 142 KM Barat Daya Tasikmalaya, telah menimbulkan : korban meninggal dunia sebanyak 127 orang, luka-luka sebanyak 1.288 orang, untuk Kerusakan Rumah rusak berat sebanyak 46.813 unit, rusak sedang 94.674 unit, rusak ringan 119.265 unit, Kerusakan Fasilitas Pendidikan Rusak berat sebanyak 2.689 unit rusak sedang 885 unit, Rusak ringan 1.660 unit. Kerusakan Fasilitas Puskesmas Rusak berat sebanyak 18 unit, rusak sedang sebanyak 13 unit, rusak ringan 6 unit. Kerusakan Pesantren sebanyak 19 unit.

. Gempa tektonik tersebut terjadi akibat tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia. Puluhan orang dilaporkan tewas dan ratusan orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, dikarenakan gempa. Total puluhan ribu bangunan rumah maupun gedung perkantoran di Indramayu, Cianjur, Ciamis, dan Kuningan mengalami kerusakan parah. Di Cianjur terjadi tanah longsor yang menyebabkan 11 rumah tertimbun. Banyaknya gunung berapi di Jawa Barat, seperti gunung: Ciremai, Galunggung, Gede, Guntur, Papandayan, Salak, dan Tangkuban Perahu yang sewaktu-waktu aktif dan dapat memuntahkan materialnya ke daerah-daerah sekitarnya serta menimbulkan bencana bagi masyarakatnya.

Tak pelak lagi bidang pendidikan pun terkena dampak bencana alam ini. Ketika terjadi bencana alam, anak-anaklah yang paling rentan terkena dampaknya. Terutama sekali jika pada saat kejadian anak-anak tersebut sedang belajar di lingkungan sekolah. antara lain rusaknya fasilitas atau sarana dan

prasarana pendidikan sekolah, peralatan belajar, dan sebagainya, sehingga berpengaruh sekali terhadap terbatasnya pelayanan pembelajaran kepada peserta didik yang diberikan oleh sekolah. Padahal mendapatkan layanan pembelajaran tidak hanya di daerah normal melainkan juga di daerah bencana alam, yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana dijamin konstitusi yang termaktub pada pasal 31, ayat (2) UUD 1945.

Kondisi tersebut tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi tanpa adanya suatu upaya terencana dan tepat guna. Sebab seandainya hal seperti itu dibiarkan akan berdampak besar menghambat pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut. Jadi, diperlukan adanya suatu layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang disesuaikan dengan permasalahan serta situasi dan kondisi di daerah tersebut.

Fasilitas pendidikan yang telah dibangun sangatlah berarti bagi masyarakat Pangalengan dan masyarakat Jawa Barat, sebagai upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar siswa sekolah dasar sehingga siswa dapat menerima pelajaran sesuai dengan tahun pelajaran yang berjalan, terutama bagi siswa kelas enam yang mengikuti ujian akhir.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahap I Tahun 2009 Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah telah menyalurkan dana bantuan sosial kepada 14 kabupaten/kota yang terkena dampak bencana gempa bumi, sebesar Rp. 457 milyar lebih yang terdiri dari dana APBN Rp. 217 milyar lebih untuk perbaikan rumah rusak berat 5.379 unit, rumah rusak sedang 9.996 unit, lauk pauk 11.812.500 orang dan *family kit* sebanyak 77.749 KK, serta dana dari APBD Provinsi Jawa Barat Rp. 240 miliar lebih yang dialokasikan untuk perbaikan rumah rusak sedang 23.994 unit, rumah rusak ringan 60 unit yang disalurkan melalui kelompok masyarakat setempat.

Sementara program pembangunan pendidikan tahun 2011 melalui APBD Provinsi Jawa Barat akan dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya meliputi : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi untuk SD/SDLB/MI/Salafiah Ula, SMP/SMPLB/MTs/Salafiah Whustha sebanyak 7.427.684 siswa, Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1500 ruang; Rehab Sekolah SD/MI, SMP/MTs sebanyak 300 ruang;

Universitas Indonesia

Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan sebanyak 3.500 ruang; Pembangunan Unit Sekolah Baru pada Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional sebanyak 3 unit; Pembangunan Unit Sekolah Baru Pendidikan Luar Biasa sebanyak 2 USB; Rehabilitasi Sekolah Luar Biasa di 10 lokasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan hasil pengolahan data penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisa data.

5.1 Deskripsi dan Analisis Data

Penelitian ini terdapat 4 dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi organisasi. Penyajian data mengenai dimensi tersebut dideskripsikan perhitungan prosentase berdasarkan responden secara keseluruhan.

Berdasarkan Kepmen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, skor minimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban minimal. Range rata-rata nilai yang di dapat adalah $5 - 1 = 4$. Banyaknya kelas ditentukan 5. Kelas interval diperoleh dari jumlah range dibagi banyaknya kelas didapat 0,8. Sebelum menentukan predikat, peneliti terlebih dahulu menentukan tolak ukur atau kriteria yang akan dijadikan patokan penilaian selanjutnya, tolak ukur yang ditentukan adalah kriteria jumlah skor dengan lima kriteria penilaian, lima kriteria penilaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 6 . Kriteria Penilaian Dimensi Komunikasi

No.	Kategori	Jumlah Skor	Rata-rata skor
1.	Sangat Baik/Jelas/Memadai	137 – 160	4,21 – 5,00
2.	Baik/Jelas/Memadai	110 – 136	3,41 – 4,20
3.	Cukup Baik/Jelas/Memadai	84 – 109	2,61 – 3,40
4.	Tidak Baik/Jelas/Memadai	58 – 83	1,81 – 2,60
5.	Sangat Tidak Baik/Jelas/Memadai	32 – 57	1 – 1,80

Sumber: Kepmen PAN NOMOR: KEP/25/M.PAN/2/2004

Selanjutnya jawaban responden dianalisis berdasarkan sub dimensi dari masing-masing dimensi, yaitu: komunikasi terdiri atas sub dimensi transmisi (cara penyampaian dan kejelasan pesan; sumber daya terdiri atas sub dimensi sumberdaya manusia, fasilitas (sarana dan prasarana) dan keuangan; Disposisi terdiri atas sub dimensi komitmen, penempatan staf dan insentif; dan struktur birokrasi terdiri dari sub dimensi fragmentasi dan prosedur operasional standar. Sedangkan untuk tiap dimensi, dari 32 responden dan jumlah butir pernyataan tentang tiap dimensi dengan skor pilihan jawaban 1 sampai 5. Skor maksimal yang dapat diperoleh dari jumlah responden dikalikan jumlah butir pernyataan dikalikan skor pilihan jawaban maksimal.

5.2 Deskripsi dan Analisis Data terhadap Dimensi Komunikasi

Analisis data terhadap dimensi komunikasi terdiri dari subdimensi transmisi dan kejelasan pesan. Analisis dilakukan per pernyataan setiap sub dimensi.

5.2.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Transmisi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi transmisi atau cara penyampaian dengan kategori jawaban sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik,

Universitas Indonesia

dan sangat tidak baik. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 6. Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
1.	Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat	1	4	10	15	2	83	2,6

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, pada transmisi 1, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 2 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 15 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 10 orang, yang menjawab kategori *baik* 4 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, hal ini ditunjukkan dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 83 dengan rata-rata skor 2,6 kategori tidak baik.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah pusat jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam. Hal ini, di ungkapkan oleh seorang guru di Cianjur :

“ pemerintah jarang melakukan sosialisasi dan tidak adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan secara kontinyu.

Universitas Indonesia

Berkaitan dengan kebijakan, Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: cara penyampaian pesan dan kejelasan pesan.

Dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan ini pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator adalah konsep umum penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan. Sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu: sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat sekolah.

Sosialisasi tingkat pusat dilakukan untuk menginformasikan program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan kepada pemerintah propinsi dan dinas pendidikan.

Tabel 7. Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah.

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
1.	Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah	1	4	10	15	2	83	2,6

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, pada transmisi 2, yaitu *sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah*
Universitas Indonesia

daerah mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 2 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 15 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 10 orang, yang menjawab kategori *baik* 4 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah pusat jarang melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, hal ini ditunjukkan dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 83 dengan rata-rata skor 2,6 kategori tidak baik.

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan seorang guru di Cianjur menyatakan bahwa :

“ Sosialisasi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, itupun jarang dilakukan dan tidak kontinyu..”

Sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan untuk menginformasikan program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan kepada suku dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Tabel 8. Pemerintah mengadakan pelatihan

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata Skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
3.	Pemerintah mengadakan pelatihan	1	3	9	17	2	80	2,5

Sumber: Peneliti (2012)

Pada transmisi 3, yaitu *pemerintah (pusat/dinas pendidikan)* mengadakan pelatihan penanggulangan bencana bidang pendidikan, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 2 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 17 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 9 orang yang menjawab kategori *baik* 3 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 3 dengan skor 80 dan rata-rata skor 2,5 kategori sedang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah (pusat dan dinas pendidikan) jarang melakukan pelatihan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan hal ini ditunjukkan dari skor yang diperoleh pada transmisi 1 dengan skor 80 dan rata-rata skor 2,5 dengan kategori tidak baik.

Salah satu faktor keberhasilan suatu kebijakan adalah adanya sosialisasi berbentuk pelatihan, karena hal ini akan menambah pemahaman pelaksana dalam melaksanakan atau menjalankan kebijakan. Pelatihan merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan stimulus kepada staf untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu. Untuk membangun dan mengembangkan staf yang profesional perlu diadakan program pelatihan secara internal dan eksternal yang diikuti oleh komunitas sumberdaya manusia, program ini mulai dari rentang workshop hingga seminar dua pekan serta pengalaman pengembangan yang spesifik.

Tabel 9. Penggunaan bahasa narasumber

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
4.	Penggunaan bahasa yang digunakan	2	4	15	11	0	93	2,91

Sumber: Peneliti (2012)

Pada transmisi 4, yaitu *Bahasa yang digunakan pembicara dalam sosialisasi penanggulangan bencana bidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak dipahami* sebanyak 0 orang, yang menjawab kategori *tidak dipahami* sebanyak 11 orang, yang menjawab kategori *cukup dipahami* 15 orang, yang menjawab kategori *dipahami* 4 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat mudah dipahami* 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian guru memahami bahasa yang digunakan oleh pembicara. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 4 dengan skor 93 dan rata-rata skor 2,91 dengan kategori cukup baik atau cukup mudah dipahami. Salah satu hal yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah *clarity* atau kejelasan pesan, dimana pesan yang disampaikan tidak berlebihan dan ambigu. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan

Tabel 10. Sosialisasi secara langsung

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
5.	Sosialisasi secara langsung	1	6	12	12	1	90	2,81

Sumber: Peneliti (2012)

Pada transmisi 5, yaitu *bentuk sosialisasi secara langsung*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 1 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 12 orang atau, yang menjawab kategori *cukup baik* 12 orang, yang menjawab kategori *baik* 6 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar guru tidak tahu atau tidak mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana bidang pendidikan secara langsung. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 5 dengan skor 90 dan rata-rata skor 2, 81 dengan kategori cukup baik.

Data tersebut di dukung hasil wawancara dengan seorang guru yang menyatakan bahwa:

“...guru tidak tahu atau tidak mengikuti sosialisasi penanggulangan bencana bidang pendidikan secara langsung, karena yang ikut hanya satu atau dua guru dan hasil dari sosialisasi tersebut tidak di komunikasikan atau disampaikan keguru-guru yang lain...”.

Permasalahan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah adanya mata rantai sosialisasi yang terputus sehingga menyebabkan implementasi kebijakan suatu program tidak berjalan dengan baik.

Tabel 11. Bentuk Sosialisasi Tak Langsung

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
6.	Sosialisasi secara tak langsung	1	6	12	12	1	90	2,81

Sumber: Peneliti (2012)

Pada transmisi 6, yaitu *bentuk sosialisasi secara tidak langsung*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 1 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 12 orang, yang menjawab kategori *baik* 6 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar guru tidak tahu sosialisasi penanggulangan bencana bidang pendidikan secara tidak langsung. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 5 dengan skor 90 dan rata-rata skor 2,81 dengan kategori cukup baik. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara yang dinyatakan bahwa:

“..selain sosialisasi secara langsung, secara tidak langsungpun jarang dilakukan sehingga kurang adanya

pemahaman dari guru mengenai program penanggulangan bencana bidang pendidikan”.

Tabel 12. Pedoman yang Digunakan

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Ratra-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
7.	Pedoman yang digunakan	1	10	14	6	1	100	3,13

Sumber: Peneliti (2012)

Pada transmisi 7, yaitu *pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 1 orang, yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 6 orang, yang menjawab kategori *cukup baik* 14 orang, yang menjawab kategori *baik* 10 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat baik* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut maka secara umum pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan cukup baik. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada transmisi 7 dengan skor 100 dengan rata-rata skor 3,13 terdapat dalam kategori cukup baik.

Pada sub dimensi transmisi atau cara penyampaian secara keseluruhan rata-rata jumlah skor 88 dengan rata-rata skor 2,75 , artinya bahwa transmisi dipandang oleh para guru masih cukup baik.

5.2.2 Analisis Data Sub Dimensi Kejelasan Pesan

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap komunikasi sub dimensi kejelasan pesan yang disampaikan dengan kategori jawaban sangat jelas (SJ), jelas (J), cukup jelas (CJ), tidak jelas (TJ), dan sangat tidak baik (STJ)., diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 13. Kejelasan Isi Pedoman

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Jelas (skor 5)	Jelas (skor 4)	Cukup Jelas (skor 3)	Tidak Jelas (skor 2)	Sangat Tidak Jelas (skor 1)		
8.	Kejelasan isi pedoman	4	16	12	0	0	120	3,75

Sumber: Peneliti (2012)

Pada kejelasan 1, yaitu *kejelasan isi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 0 orang, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 0 orang, yang menjawab kategori *cukup jelas* 12 orang, yang menjawab kategori *jelas* 16 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 4 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum isi pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan ditanggapi sudah jelas oleh guru. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada kejelasan isi pedoman dengan skor 120 dengan dan rata-rata skor 3,75 masuk dalam kategori baik atau jelas. Ketidakjelasan pesan dapat membuat tidak tercapainya perubahan yang diinginkan, ketidakjelasan pesan juga dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang tidak direncanakan dan tidak terantisipasi.

Universitas Indonesia

Tabel 14. Tingkat Pemahaman guru

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Jelas (skor 5)	Jelas (skor 4)	Cukup Jelas (skor 3)	Tidak Jelas (skor 2)	Sangat Tidak Jelas (skor 1)		
9.	Tingkat pemahaman guru	5	15	11	1	0	120	3,75

Sumber: Peneliti (2012)

Kejelasan 2, yaitu, *tingkat pemahaman guru terhadap tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak jelas* sebanyak 0 orang, guru yang menjawab kategori *tidak jelas* sebanyak 1 orang, yang menjawab kategori *cukup jelas* 11 orang, yang menjawab kategori *jelas* 15 orang, dan sedangkan menjawab kategori *sangat jelas* 5 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum tingkat kejelasan guru terhadap tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan cukup jelas atau paham. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dengan skor 120 dan rata-rata skor 3,75 dengan kategori baik atau jelas.

Pada sub dimensi kejelasan pesan yang disampaikan secara keseluruhan rata-rata skor 120 dan rata-rata skor 3,75, artinya bahwa kejelasam dipandang oleh para guru jelas atau baik.

5.2.4 Analisis Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi komunikasi dengan kategori jawaban sangat baik,

Universitas Indonesia

baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel . Analisis Dimensi Komunikasi

Pernyataan	Kategori Jawaban					Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)	
Sosialisasi oleh Pemerintah Pusat	1	4	10	15	2	2,60
Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah	1	4	10	15	2	2,60
Pemerintah mengadakan pelatihan	1	3	9	17	2	2,50
Penggunaan bahasa yang digunakan	2	4	15	11	0	2,91
Sosialisasi secara langsung	1	6	12	12	1	2,81
Sosialisasi secara tak langsung	1	6	12	12	1	2,81
Pedoman yang digunakan	1	10	14	6	1	3,13
Kejelasan isi pedoman	4	16	12	0	0	3,75
Tingkat pemahaman guru	5	15	11	1	0	3,75
Rata-rata Skor dimensi Komunikasi						2,98

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari dimensi komunikasi sebesar yang berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden atau guru berpersepsi sedang pada dimensi komunikasi. Pernyataan yang memiliki skor terendah adalah pemerintah mengadakan sosialisasi dan pelatihan sedangkan skor tertinggi adalah adanya pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang pendidikan.

Universitas Indonesia

Dalam komunikasi kebijakan memiliki dua dimensi, yaitu transformasi, dan kejelasan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung kepada kebijakan publik tadi. Oleh karena, itu dimensi komunikasi mencakup transformasi kebijakan dan kejelasan. Dimensi kejelasan, menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Joko Widodo komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy Implementators*).

Berkaitan dengan kebijakan Edward III menyatakan bahwa *communication* adalah penyampaian pesan/informasi mengenai kebijakan dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pesan tersebut harus jelas, akurat, dan konsisten sehingga pelaksana kebijakan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam analisis implementasi kebijakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi yaitu: cara penyampaian pesan dan kejelasan pesan.

Dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan ini pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator adalah konsep umum penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan. Sosialisasi kepada pihak lain yang berkepentingan melalui sosialisasi program. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang atau tingkatan, yaitu:

Universitas Indonesia

sosialisasi tingkat pusat, sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi tingkat kabupaten/kota, sosialisasi tingkat kecamatan dan sosialisasi tingkat sekolah.

Sosialisasi tingkat pusat dilakukan untuk menginformasikan program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan kepada pemerintah propinsi dan dinas pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan seorang staf yang menangani program penanggulangan bencana di bidang pendidikan di tingkat pusat menyatakan bahwa :

“ Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dilakukan hanya 2 kali dalam 1 tahun termasuk kegiatan pelatihan/workshop...”

Sosialisasi tingkat propinsi, sosialisasi dilakukan oleh dinas pendidikan untuk menginformasikan program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan kepada suku dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepada sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Namun berdasarkan wawancara dengan seorang guru di Tasikmalaya menyatakan bahwa:

“ Sosialisasi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat...”

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, cara penyampaian atau transmisi program penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan dilakukan secara langsung misalnya pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya. Namun dalam pelaksanaannya, menurut seorang guru di Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan:

“ sosialisasi mengenai penanggulangan bencana alam sebaiknya dilakukan dengan kontinyu, bukan hanya saat

Universitas Indonesia

setelah bencana datang sehingga kesannya program tersebut hanya incidental”

5.3 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Sumberdaya

Analisis data terhadap dimensi sumberdaya terdiri dari subdimensi SDM, fasilitas, dan keuangan, Analisis dilakukan per pernyataan setiap sub dimensi.

5.3.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi SDM

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi sumberdaya manusia dengan kategori jawaban sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 15 . Jumlah tenaga dalam program

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
10.	Jumlah tenaga dalam program	2	8	8	14	0	94	2,94

Sumber: Peneliti (2012)

Pada SDM 1, yaitu *jumlah tenaga dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 14 orang , yang menjawab kategori *cukup baik* 8 orang, yang menjawab kategori *baik* 8 orang, dan menjawab kategori *sangat baik* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum jumlah tenaga dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan

Universitas Indonesia

dalam kategori cukup baik atau cukup memadai hal ini dapat terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh yaitu 2,94, dalam rekomendasi atau saran yang diberikan oleh guru salah satunya adalah penambahan jumlah tenaga atau petugas dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan. Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“...jumlah tenaga dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan ini sangat kurang sehingga proses sosialisasi atau pun pelaksanaan program yang lain sangat kurang..”.

Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staff pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik

Tabel 16. Keterlibatan guru

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
11.	Keterlibatan guru	3	11	10	8	0	105	3,28

Pada SDM 2, yaitu *Keterlibatan guru dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang menjawab kategori *sangat tidak baik* sebanyak 0 orang, guru yang menjawab kategori *tidak baik* sebanyak 8 orang atau 25 %, yang menjawab kategori *cukup baik* 10 orang, yang menjawab kategori *baik* 11 orang, dan menjawab kategori *sangat baik* 3 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum keterlibatan guru dalam program penanggulangan bencana dibidang pendidikan

Universitas Indonesia

dalam kategori baik atau memadai, hal ini terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh sebesar 3,28.. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Jumlah staf pelaksana yang besar terkadang diperlukan agar kebijakan yang disampaikan dapat dipantau dengan baik. Tidak hanya jumlah staff yang banyak saja yang diperlukan tetapi juga kemampuan para staff pelaksana tersebut dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam aktivitas operasional sumberdaya manusia, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumberdaya manusia terhadap pencapaian tujuan organisasi

5.3.2 Analisis Data Sub Dimensi Fasilitas

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi Fasilitas dengan kategori jawaban sangat memadai, Memadai, cukup Memadai, tidak memadai, dan sangat tidak Memadai, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 17. Ketersediaan Fasilitas

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
12.	Ketersediaan fasilitas	1	9	10	10	2	93	2,91

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 1, yaitu *ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan*

Universitas Indonesia

program penanggulangan bencana dibidang pendidikan, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 10 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 10 orang, sedangkan yang menjawab kategori *memadai* 9 orang dan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum ketersediaan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan bencana dibidang pendidikan menurut guru masuk dalam kategori cukup memadai dapat terlihat dari rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,91, dalam rekomendasi atau saran yang diberikan oleh guru salah satunya adalah ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan program penanggulangan bencana dibidang pendidikan. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari ketersediaan sarana prasaranadengan skor 93 dengan kategori cukup baik.

Tabel 18. Ketersediaan Bahan Pendukung

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
13.	Ketersediaan bahan pendukung	1	9	10	10	2	93	2,91

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 2, yaitu *ketersediaan bahan pendukung*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 10 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 10 orang, sedangkan yang

Universitas Indonesia

menjawab kategori *memadai* 9 orang dan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum ketersediaan bahan pendukung untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan bencana dibidang pendidikan menurut guru masuk dalam kategori cukup memadai, dalam rekomendasi atau saran yang diberikan oleh guru salah satunya adalah ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana dan bahan pendukung dalam menunjang pelaksanaan program penanggulangan bencana dibidang pendidikan. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh pada dari ketersediaan sarana prasaranadengan skor 93 dan rata-rata skor 2,91 dengan kategori cukup baik.

Tabel 19. Kemudahan Penggunaan Fasilitas

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
14.	Kemudahan penggunaan fasilitas	2	8	14	4	2	94	2,94

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 3, yaitu *kemudahan penggunaan sarana prasarana atau fasilitas*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 4 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 14 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 8 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum responden menyatakan bahwa kemudahan dalam pemanfaatan sarana atau fasilitas masuk

Universitas Indonesia

dalam kategori cukup. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 94 dan rata-rata skor 2,94 dengan kategori *cukup baik*. Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staff yang cukup, mengerti apa yang akan dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih apa yang harus dilakukan, mempunyai kewenangan untuk melatih tugasnya, akan tetapi tanpa fasilitas fisik seperti gedung yang dibutuhkan, peralatan, persediaan maka implementasi kebijakan yang paling mudah pun tidak akan dapat terlaksana.

Tabel 20. Keterpeliharaan Fasilitas

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
15.	Keterpeliharaan fasilitas	2	6	16	4	2	92	2,88

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fasilitas 4, yaitu *keterpeliharaan fasilitas*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 4 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 16 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 6 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum responden menyatakan bahwa keterpeliharaan sarana atau fasilitas masuk dalam kategori cukup. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh yaitu 92 dan rata-rata skor 2,88 dengan kategori *cukup baik*.

5.3.3 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Keuangan

Universitas Indonesia

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap Sumberdaya sub dimensi keuangan dengan kategori jawaban sangat memadai, Memadai, cukup Memadai, tidak memadai, dan sangat tidak Memadai, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 21. Bantuan Dana Dari Pemerintah

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
16.	Bantuan dana dari pemerintah	2	7	8	14	1	91	2,84

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan atau finansial 1, yaitu *bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 14 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 8 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 7 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) tidak memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dari bantuan dana dari pemerintah (pusat/dinas pendidikan) untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, dengan skor 91 dan rata rata skor 2,84 dengan kategori *cukup baik*.

Tabel 22. Ketersediaan Dana

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
17.	Ketersediaan dana	1	8	10	12	1	92	2,88

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keuangan atau finansial 2, yaitu *ketersediaan dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 10 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 8 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan sangat tidak memadai. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dari ketersediaan dana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, dengan skor 92 dan skor rata-rata 2,88 dengan kategori *cukup baik*.

5.3.4 Analisis Dimensi Sumberdaya

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi komunikasi dengan kategori jawaban sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 23. Analisis Dimensi Sumberdaya

Pernyataan .	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
Jumlah tenaga dalam program	2	8	8	14	0	94	2,94
Keterlibatan guru	3	11	10	8	0	105	3,28
Ketersediaan fasilitas	1	9	10	10	2	93	2,91
Ketersediaan bahan pendukung	1	9	10	10	2	93	2,91
Kemudahan penggunaan fasilitas	2	8	14	4	2	94	2,94
Keterpeliharaan fasilitas	2	6	16	4	2	92	2,88
Bantuan dana dari pemerintah	2	7	8	14	1	91	2,84
Ketersediaan dana	1	8	10	12	1	92	2,88
Rata-rata skor dimensi sumber daya							2,95

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui rata-rata skor yang diperoleh sebesar 2,59 maka berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden atau guru berpersepsi cukup baik pada dimensi sumberdaya. Pernyataan yang dinilai baik adalah keterlibatan guru dalam pelaksanaan guru sedangkan nilai terendah adalah bantuan dana dari pemerintah yang dianggap belum memadai.

Sumber daya dapat menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards III adalah kualitas dan kuantitas staf pelaksana, ketersediaan fasilitas pendukung bagi staff dalam rangka melaksanakan kebijakan. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan.

Universitas Indonesia

5.4 Deskripsi dan Analisis Data Dimensi Disposisi

Analisis data pada dimensi disposisi terdiri dari subdimensi komitmen dan insentif.

5.4.1 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Komitmen

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi dimensi sub dimensi komitmen dengan kategori jawaban sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 24. Usaha guru

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
18.	Usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program	2	8	15	6	1	100	3,12

Sumber: Peneliti (2012)

Pada komitmen 1, yaitu *Usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program*, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 32 responden, responden yang masuk kategori *sangat tidak baik* 1 orang, yang masuk kategori *tidak baik* 6 orang, yang masuk kategori *cukup baik* 15 orang, yang masuk kategori *baik* 8 orang, dan sedangkan masuk kategori *sangat baik* sebanyak 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program dalam kategori cukup baik. Sedangkan dilihat dari skor yang diperoleh dari komitmen 1 yaitu usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program adalah 100 dan rata-rata skor 3,12 dengan kategori *cukup baik*.

Universitas Indonesia

5.4.2 Analisis Data Sub Dimensi Insentif

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap disposisi sub dimensi intensif dengan kategori jawaban sangat memadai, Memadai, cukup Memadai, tidak memadai, dan sangat tidak Memadai, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 25. Pemberian Insentif

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
19.	Pemberian insentif	0	2	10	14	6	68	2,12

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa insentif 1, yaitu *pemberian insentif dalam melaksanakan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 6 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 14 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 10 orang atau, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 2 orang dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa pemberian insentif dalam melaksanakan penanggulangan bencana bidang pendidikan tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 68 dengan rata-rata skor 2,12, masuk dalam kategori tidak baik, menurut guru selama ini tidak pernah menerima insentif maupun penghargaan atas pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Tabel 26. Pemberian Insentif Setelah Melaksanakan Tugas.

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
20.	Pemberian insentif setelah melaksanakan program	0	1	11	12	8	69	2,16

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa intensif 2, yaitu *Pemberian insentif setelah melaksanakan program*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 8 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 12 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 11 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 1 orang dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa Pemberian insentif setelah melaksanakan program tidak memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh untuk pemberian insentif sebesar 69 dan rata-rata skor yang diperoleh 2,16, masuk dalam kategori tidak baik, menurut guru selama ini tidak pernah menerima insentif maupun penghargaan atas pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan.

Tabel 27. Nilai Insentif

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
21.	Insentif yang diberikan bernilai penting	0	8	12	9	3	89	2,78

Sumber: Peneliti (2012)

Universitas Indonesia

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa intensif 3, yaitu insentif yang diberikan bernilai penting bagi guru, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 3 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 9 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 12 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 8 orang dan *sangat memadai* tidak ada.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan insentif yang diberikan bernilai masuk dalam kategori cukup memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan nilai pemberian insentif sebesar 89 dengan rata-rata skor 2,78 masuk dalam kategori cukup memadai/baik.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepantasan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan tehnik potensial untuk menanggulangi sikap pelaksana kibijakan.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah: mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai, penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja, penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya, membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer

Universitas Indonesia

mempercayai mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

5.4.4 Analisis Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi disposisi dengan kategori jawaban sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 28. Analisis Dimensi Disposisi

	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
	Sangat Baik (skor 5)	Baik (skor 4)	Cukup Baik (skor 3)	Tidak Baik (skor 2)	Sangat Tidak Baik (skor 1)		
Usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program	2	8	15	6	1	100	3,12
Pemberian insentif	0	2	10	14	6	68	2,12
Pemberian insentif setelah melaksanakan program	0	1	11	12	8	69	2,16
Insentif yang diberikan bernilai penting	0	8	12	9	3	89	2,78
Rata-rata skor dimensi disposisi						81	2,54

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata jumlah skor responden pada dimensi disposisi 81 dan rata-rata skor 2,54. Berdasarkan kriteria penilaian, nilai 81 dan 2,54 berada pada kategori tidak baik, artinya bahwa responden atau guru berpersepsi tidak baik pada dimensi disposisi. Aspek yang dinilai sudah baik adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program penyelenggaraan penanggulangan

Universitas Indonesia

bencana dibidang pendidikan, sedangkan aspek yang masih kurang adalah pemberian insentif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksana. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan mengalami banyak masalah.

Keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan untuk memiliki kebijakan yang sedang diimplementasikan. Dan disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan dimana akan menguntungkan bukan hanya organisasinya tetapi juga dirinya sendiri. Kecakapan saja tidak cukup tanpa komitmen dan kesediaan untuk melaksanakan kebijakan.

Lebih jauh Edward III menyebut dua hal penting berkenaan dengan dispositions. Hal pertama adalah sikap para staf dan yang kedua mengenai insentif bagi pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana merupakan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Jika staf yang ada tidak dapat mengimplementasikan kebijakan seperti keinginan para pembuat kebijakan, perlu diganti dengan staf yang lebih responsive terhadap pimpinan.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang penanggulangan bencana bidang pendidikan. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk

Universitas Indonesia

pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.

Sementara insentif menekankan pada tingkat kecukupan/kepentingan reward yang akan diterima pelaksana kebijakan jika bersedia dan/atau berhasil menerapkan kebijakan. Insentif juga dimaknai luas sebagai sarana “pengendalian” bagi pelaksana kebijakan agar bersedia menerapkan kebijakan sesuai yang direncanakan pembuat kebijakan. Pemberian insentif merupakan teknik potensial

Namun berdasarkan wawancara dengan seorang guru di Cianjur dan seorang staff kegiatan program penanggulangan bencana bidang pendidikan menyatakan bahwa “*Selama ini belum ada insentif yang diberikan...*”

Dari penjelasan diatas adalah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Pemberian insentif hendaknya mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti yang diungkapkan oleh Dimock (1986, p.254). prinsip-prinsip tersebut adalah: Mencari dan berusaha menemukan bahwa pemberian hadiah memiliki arti penting bagi para pegawai; Penghargaan yang cepat, sehingga pegawai sadar apa yang baru diterimanya, jangan menunda-nunda pemberian penghargaan atau bawahan menjadi tidak mempunyai motivasi lagi untuk bekerja; Penghargaan hendaknya diberikan apabila mereka memang pantas menerimanya; Membiarkan pegawai mengetahui apa yang terjadi dapat sangat menguntungkan. Langkah ini sekaligus memberikan penghargaan kepada bawahan dengan menunjukkan bahwa manajer

Universitas Indonesia

memperkirakan mereka dan memperbolehkan mereka melihat bahwa penghargaan yang diberikan adalah objektif.

5.5 Analisis Data Dimensi Struktur Birokrasi

Analisis data struktur birokrasi terdiri dari subdimensi *standard operational procedur* dan fragmentasi.

5.5.1 Analisis data Terhadap Sub Dimensi SOP

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi *standard operational procedur* dengan kategori jawaban sangat memadai, Memadai, cukup Memadai, tidak memadai, dan sangat tidak Memadai, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 29. Ketersediaan SOP

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
22.	Ketersediaan SOP	2	10	15	4	1	104	3,25

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 1, yaitu *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 4 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 15 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* sebanyak 10 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori cukup memadai. Berdasarkan skor yang diperoleh dari

Universitas Indonesia

pernyataan ketersediaan *Standard Operating Procedures (SOP)* sebesar 104 dengan rata-rata skor 3,25, masuk dalam kategori cukup baik.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures (SOP)*. SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya.

SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Tabel 30. Kejelasan SOP

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
23.	Kejelasan <i>SOP</i>	2	11	15	3	1	106	3,31

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa SOP 2, yaitu *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)*, responden yang menjawab kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang, guru yang menjawab kategori *tidak memadai* sebanyak 3 orang, yang menjawab kategori *cukup memadai* 15 orang, yang menyatakan

Universitas Indonesia

masuk kategori *memadai* sebanyak 11 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 2 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)* masuk dalam kategori cukup memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan *kejelasan Standard Operating Procedures (SOP)* sebesar 106 dengan skor rata-rata 3,31 masuk dalam kategori cukup baik.

5.5.2 Tanggapan Guru Terhadap Sub Dimensi Fragmentasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap struktur birokrasi sub dimensi fragmentasi dengan kategori jawaban sangat memadai, Memadai, cukup Memadai, tidak memadai, dan sangat tidak Memadai, diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 31. Ketersediaan Tim Khusus

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
24.	Ketersediaan tim khusus	1	11	10	8	2	97	2,84

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 1, yaitu *ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 8 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 10 orang, yang menyatakan

masuk kategori *memadai* 11 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan cukup memadai. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan masuk dalam kategori cukup memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan sebesar 97 dengan rata-rata skor 2,84 dan masuk dalam kategori cukup baik.

Tabel 32. Ketersedian Job Description

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
25.	Ketersediaan <i>job description</i>	1	11	10	9	1	98	3,06

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 2, yaitu *ketersediaan Job Description yang dimiliki anggota tim*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 1 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 9 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 10 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 11 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa ketersediaan Job Description yang dimiliki anggota tim dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan

Universitas Indonesia

cukup memadai. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan ketersediaan Job Description yang dimiliki anggota tim dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan masuk dalam kategori cukup memadai. Sedangkan berdasarkan skor yang diperoleh dari pernyataan ketersediaan Job Description yang dimiliki anggota tim dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan sebesar 98 dengan skor rata-rata 3,06 masuk dalam kategori cukup baik.

Tabel 33. Kejelasan Job Deskripsi

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
26.	Kejelasan <i>job description</i>	1	10	11	7	3	95	2,97

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 3, yaitu kejelasan *Job Description* yang dimiliki anggota tim, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 3 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 7 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 11 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 10 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 1 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *Job Description* yang dimiliki anggota tim cukup memadai atau cukup jelas, hal ini terlihat dari skor rata-rata yang diperoleh sebesar 2,97.

Tabel 34. Pertemuan dengan Pemerintah

No. Item	Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
		Sangat Memadai	Memadai	Cukup Memadai	Tidak Memadai	Sangat Tidak Memadai		
27.	Pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program	4	4	8	14	2	90	2,81

Sumber: Peneliti (2012)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa fragmentasi 4, yaitu *Pemerintah/Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan berkala dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan*, responden yang menyatakan masuk kategori *sangat tidak memadai* sebanyak 2 orang, guru yang menyatakan kategori *tidak memadai* sebanyak 14 orang, yang menyatakan kategori *cukup memadai* 8 orang, yang menyatakan masuk kategori *memadai* 4 orang dan yang menyatakan *sangat memadai* 4 orang.

Berdasarkan hasil tersebut, secara umum guru menyatakan bahwa *Pemerintah/Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan berkala dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan* atau tidak memadai. Berdasarkan skor yang diperoleh sebesar 90 dan rata-rata skor 2,81 dapat dikategorikan cukup memadai.

5.5.3 Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil analisis rata-rata jawaban responden terhadap dimensi disposisi dengan kategori jawaban sangat memadai, memadai, cukup memadai, tidak memadai, dan sangat tidak memadai. Diperoleh gambaran seperti terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 35. Analisis Dimensi Struktur Birokrasi

Pernyataan	Kategori Jawaban					Jmlh skor	Rata-rata skor
	Sangat Memadai (skor 5)	Memadai (skor 4)	Cukup Memadai (skor 3)	Tidak Memadai (skor 2)	Sangat Tidak Memadai (skor 1)		
Ketersediaan <i>SOP</i>	2	10	15	4	1	104	3,25
Kejelasan <i>SOP</i>	2	11	15	3	1	106	3,31
Ketersediaan tim khusus	1	11	10	8	2	97	3,03
Ketersediaan <i>job description</i>	1	11	10	9	1	98	3,06
Kejelasan <i>job description</i>	1	10	11	7	3	95	2,97
Pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program	4	4	8	14	2	90	2,81
Skor rata-rata Dimensi Struktur Birokrasi							3,07

Sumber: Peneliti (2012)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada dimensi struktur birokrasi sebesar 3,07, berdasarkan kriteria penilaian rata-rata skor 3,07 berada pada kategori cukup baik. Pernyataan atau aspek yang dinilai baik adalah ketersediaan *SOP* sedangkan aspek yang dinilai belum baik adalah pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program.

Salah satu hal yang penting dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik oleh organisasi adalah adanya sejenis *standard operating procedures* (SOP). SOP merupakan positivisasi atau pembakuan terhadap langkah-langkah dan prosedur yang harus dikerjakan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan, misalnya SOP pembuatan keputusan, SOP pertanggungjawaban kegiatan, SOP pengawasan kegiatan, dan lain sebagainya. SOP adalah suatu standard penyikapan baku yang harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Kebakuan seperti ini membuat kebijakan diterapkan secara seragam dan standar, padahal bisa jadi masing-masing masalah yang dihadapi memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan karakteristik yang harusnya disikapi dengan kebijakan berbeda pula.

Edwards III mengemukakan pentingnya memperhatikan *fragmentation* dalam struktur birokrasi. Menurut Edwards *fragmentation* adalah pembagian pusat koordinasi dan pertanggungjawaban. Atau bisa dikatakan bahwa fragmentation adalah terpecah-pecahnya pelaksana kebijakan karena banyaknya organisasi atau badan yang terlibat di dalamnya. *Fragmentation* membawa konsekuensi yang besar bagi keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin banyak pihak yang itu terlibat, pelaksana kegiatan cenderung kurang fokus. Tetapi disisi lain, jika suatu kegiatan memiliki skala besar sementara koordinasi dan pertanggungjawaban yang pada akhirnya mengakibatkan tersendatnya pelaksana kegiatan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi guru terhadap komunikasi atau sosialisasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan berada pada kategori cukup baik. Dalam arti bahwa komunikasi dalam implementasi pelaksanaan penanggulangan bencana bidang pendidikan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Aspek yang belum memadai atau belum baik, seperti; sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan pelatihan penanggulangan bencana. Sedangkan aspek yang baik adalah kejelasan pedoman dan pemahaman guru terhadap isi pedoman.

Pada dimensi sumberdaya, tanggapan guru dalam kategori cukup baik atau cukup memadai artinya bahwa responden atau guru berpersepsi cukup baik pada dimensi sumberdaya. Pernyataan yang dinilai baik adalah keterlibatan guru dalam pelaksanaan guru sedangkan nilai terendah adalah bantuan dana dari pemerintah yang dianggap belum memadai.

Dimensi disposisi berada pada kategori cukup baik, artinya bahwa responden atau guru berpersepsi cukup baik pada dimensi disposisi. Aspek pemberian insentif oleh pemerintah belum memadai baik insentif untuk guru maupun untuk sekolah. Aspek yang dinilai sudah baik adalah usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang pendidikan.

Dimensi struktur birokrasi responden atau guru berpersepsi cukup baik pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah cukup memadai, hal ini terlihat dari tim khusus yang penanggulangan bencana bidang pendidikan dan job deskripsi yang jelas dan ketersediaan *SOP* sedangkan aspek yang dinilai belum baik adalah pertemuan dengan pemerintah untuk membahas permasalahan program.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua aspek atau dimensi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih kategori cukup baik/memadai, artinya bahwa

pelaksanaan implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih maksimal dan lebih efektif, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk lebih mandiri di dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan. Dengan demikian Pengurangan Resiko bencana akan lebih mudah ditanggapi.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan adanya upaya-upaya dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana bidang pendidikan, yaitu; Aspek komunikasi, perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait secara terperinci dan mendalam mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan, adanya bimbingan dan pendampingan bagi sekolah penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan oleh pemerintah (kementerian pendidikan nasional, Dinas Pendidikan tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota) dan instansi terkait. Bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan, seminar-seminar dan forum-forum diskusi atau bentuk kegiatan lainnya.

Aspek sumberdaya, adanya bantuan dana, sarana prasarana, tim khusus untuk memperlancar kegiatan belajar dan pembelajaran, dan usaha yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan pengetahuan mengenai program penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang pendidikan perlu dipertahankan.

Aspek disposisi, agar guru mempertahankan sikap positif terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang pendidikan dan bagi pemerintah untuk memberikan insentif atau penghargaan kepada sekolah maupun guru yang telah menjalankan tugas.

Aspek struktur birokrasi, agar komponen ketersediaan SOP dan kejelasan jobdeskripsi dapat dipertahankan, sedangkan pertemuan antara pihak sekolah dengan pemerintah perlu diadakan untuk membahas permasalahan program.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Imron (2008), *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Alwasilah, A. Chaedar (2003), *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Baedhowi (2009). *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Konsep Dasar dan Implementasi*. Pelita Insani, Semarang.
- Borg, W.R. & Gall, M.D. (2003). *Educational Research an Introduction*. Seventh Edition. New York : Longman
- Creswel, Jhon W. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Aproach*. London : Sage Publication.
- Cawththorne, Nigel. 2003. *100 Bencana Yang Mengguncang Dunia*. Tangerang: KARISMA Publising Group.
- Dwiyanto Indiahono, (2009), *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dye, Thomas R (1995) *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey.
- Effendy, Onong Uchjana (2009), *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fred N. Kerlinger (2006). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Edisi ketiga. Gajah Mada University Press.
- George III Edward (1980), *Implementing Public Policy*, Washington Congressional Quaterly Inc.
- Hasniati. 2008. *Manajemen Bencana: Sebuah Upaya Untuk Meminimalisasi Dampak Bencana*. Jurnal Administrasi Negara Vol.X No.2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW.
- Hermawan. 2008. *Mendefinisikan Insiden Teknologi Sebagai Bencana: Belajar Dari Kasus Lumpur Lapindo*. Jurnal Administrasi Negara Vol.X No.2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW.
- Herman Sofyandi (2008), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Joni, TR (1980). *Evaluasi Program*. Jakarta, P2LPTK.
- Kementerian Pendidikan Nasional (2010), *Panduan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan*.
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (2010).
- Lina Marlina dan Riyan, 2011, *Buku Pintar Bencana Alam*,
- Mardiyono. 2008. *Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Mitigasi Bencana Alam*. Jurnal Administrasi Negara Vol.X No.2 Malang: Fakultas Ilmu Administrasi UNBRAW. 348.
- Moekijat (1995), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Ali, (2009), *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional*, (Jakarta: PT. Imperial Bhakti Utama).
- Prasetya Irawan (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. DIA FIFIP UI.
- Pomonis, A., Spence, R.J.S., dan Coburn, A.W., 1994. *Mitigasi Bencana*. Program pelatihan manajemen bencana UNDP Edisi Kedua bekerjasama dengan Cambridge Architectural Research Limited. Cambridge. United Kingdom.
- Priambodo, S Arie. 2009. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F (2006), *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn (2006), *Metode Evaluasi Kualitatif*, diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho (2009), *Public Policy (Edisi revisi)*. Jakarta, Gramedia.
- Rahmat, A., 2006. *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. Badan Penanggulangan Lingkungan Hidup (BPLHD) Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Rusydi, F. 2004. *Habis Gempa, Datanglah Gelombang Air Laut: Fenomena Tsunami dari Gempa Bumi*. Alumnus Teknik Fisika ITB, Mahasiswa.
- Sadisun, I.A., 2004. *Manajemen bencana : Strategi Hidup di Wilayah Berpotensi Bencana*. Keynote Speker pada Lokakarya Kepedulian Terhadap Kebencanaan Geologi dan Lingkungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, ITB Bandung.

- Sadisun. I.A., 2006. *Peran dan Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam di Jawa Barat (Smart SOP Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam)*. Pusat Mitigasi Bencana Geologi Terapan Fakultas Ilmu Kebumihan dan Teknologi Mineral ITB. Bandung.
- Singarimbun dan Efendi. 1995. *Penelitian Survei*. Jakarta, Gramedia.
- Suharsimi, A. (1988). *Evaluasi Program*. Jakarta, P2LPTK.
- Sukandarrumidi, 2010, *Bencana Alam dan Bencana Antropogene*, Kanisius
- Syafarudin (2008), *Efektivitas kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, Miftaf, 2008, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tim Editor Atlas dan Geografi, 2008 *Seri Bencana Alam di Indonesia*, Erlangga
- Tim Editor Atlas dan Geografi, 2008 *Bencana Alam: Banjir dan Longsor*, Erlangga
- Widodo, Joko, 2007, *Analisis Kebijakan Publik*, Bayumedia Publishing Sidoarjo.
- UNDP, 1992. *Tinjauan Umum Manajemen Bencana*. PBB: Pusat Manajemen Bencana Universitas Wisconsin.
- UNDP., 2004. *Reducing Disaster Risk A Challenge for Development*. United Nations Development Programme, Bureau for Crisis and Recovery.

LAMAN

www.bmg.go.id. *Mekanisme Terjadinya Tsunami*. 14 Nopember 2007.

www.vsi.esdm.go.id. *Bencana Geologi : Gunung berapi, Gempa Bumi, Tsunami*. 9 Juni 2008.

PERATURAN DAN PANDUAN

Annual Report dan Handbook Penanggulangan Bencana Alam di Lingkungan Ditjen Mandikdasmen Tahun 2010, Kementerian Pendidikan Nasional.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta, Sekjen Depdiknas.
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penanggulangan bencana. UU Nomor 24 Tahun 2007
- Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas.UU Nomor 20 Tahun 2003
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Smp/Mts), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Sma/Ma). Jakarta, Biro Hukum dan Organisasi Depdiknas.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah nasional Tahun 2004-2009. Perpres Nomor 7 tahun 2005
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004

Jakarta, November 2011

Kepada Yth,

.....

Di

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winda Paramita

NPM : 0906589394

Saat ini saya sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis yang berjudul "**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan**" sebagai persyaratan dalam penyelesaian studi di Universitas Indonesia, saya menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk bersedia mengisi kuesioner yang merupakan bahan informasi yang dibutuhkan.

Tidak ada jawaban yang benar atau salah terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Oleh karena itu saya sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu sekalian untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kerahasiaan jawaban ini akan dijaga sebaik-baiknya.

PETUNJUK PENGISIAN:

- 1. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda sesuai.**
- 2. Tidak ada jawaban yang benar atau salah terhadap pernyataan-pernyataan berikut. Bapak/Ibu dapat memilih sesuai dengan kondisi/fakta sesungguhnya.**

Terima kasih atas kerja sama yang telah Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini.

Hormat saya

Peneliti

Winda Paramita

KUESIONER

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG PENDIDIKAN.

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama** : *(boleh inisial)*
- Nama Sekolah** :
- Jenis Kelamin** :
- Riwayat Pendidikan**
1. **D2/D3** :
- Jurusan** :
2. **S1** :
- Jurusan** :
3. **S2/S3** :
- Jurusan** :
- Mengajar di Kelas** :

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
1.	Pemerintah (Pusat/Dinas Pendidikan) mengadakan penyuluhan/sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
2.	penyuluhan/sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan mengenai penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
3.	Pemerintah (Pusat/Dinas Pendidikan) mengadakan pelatihan penanganan bencana dalam bidang pendidikan.	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
4.	Saat sosialisasi tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan, penggunaan bahasa yang disampaikan pembicara	A. Sangat Mudah Dipahami	B. Mudah Dipahami	C. Netral	D. Tidak Dipahami	E. Sangat Tidak Dipahami
5.	Sosialisasi/penjelasan mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan disampaikan oleh Dinas Pendidikan secara langsung (Seminar, workshop, pelatihan)	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
6.	Sosialisasi/penjelasan mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan juga disampaikan oleh Dinas pendidikan secara tidak langsung.	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
7.	Pedoman tentang cara pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah (pusat atau daerah)	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
8.	Tingkat kejelasan isi/substansi pedoman pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
9.	Tingkat pemahaman terhadap tujuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Paham	B. Paham	C. Netral	D. Tidak Paham	E. Sangat Tidak Paham
10.	Jumlah tenaga dalam program penanggulangan bencana bidang pendidikan	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
11.	Keterlibatan Bapak/Ibu dalam program penanggulangan bencana dalam bidang pendidikan	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
12.	Ketersediaan fasilitas dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan	A. Sangat Lengkap	B. Lengkap	C. Cukup Lengkap	D. Tidak Lengkap	E. Sangat Tidak Lengkap
13.	Ketersediaan bahan untuk mendukung dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan	A. Sangat Lengkap	B. Lengkap	C. Cukup Lengkap	D. Tidak Lengkap	E. Sangat Tidak Lengkap

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		A.	B.	C.	D.	E.
14.	Kemudahan penggunaan sarana prasarana dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan	A. Sangat Mudah	B. Mudah	C. Cukup Mudah	D. Tidak Mudah	E. Sangat Tidak Mudah
15.	Keterpeliharaan sarana prasarana/fasilitas dalam penanggulangan bencana bidang pendidikan	A. Sangat Terpelihara	B. Terpelihara	C. Cukup	D. Tidak Terpelihara	E. Sangat Tidak Terpelihara
16.	Dinas pendidikan/ Kemendiknas memberikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
17.	Ketersediaan dana dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
18.	Saya berusaha untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
19.	Pemberian insentif dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah
20.	Intensif diberikan sesaat setelah melaksanakan/ membantu penanggulangan bencana bidang pendidikan.	A. Sangat Sering	B. Sering	C. Cukup	D. Kadang-kadang	E. Tidak Pernah

No	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
21.	Insentif yang diberikan bernilai penting bagi bapak/ibu	A. Sangat Bernilai	B. Bernilai	C. Cukup Bernilai	D. Kurang Bernilai	E. Tidak Bernilai
22.	Ketersediaan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> .	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
23.	Kejelasan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> sebagai acuan dalam melaksanakan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
24.	Ketersediaan tim khusus dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
25.	Ketersediaan <i>Job Description</i> yang dimiliki anggota tim	A. Sangat Memadai	B. Memadai	C. Netral	D. Tidak Memadai	E. Sangat Tidak Memadai
26.	<i>Job Description</i> yang dimiliki anggota tim	A. Sangat Jelas	B. Jelas	C. Netral	D. Tidak Jelas	E. Sangat Tidak Jelas
27.	Pemerintah/Dinas Pendidikan mengadakan pertemuan berkala dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan	A. 4 kali per tahun	B. 3 kali per tahun	C. 2 kali per tahun	D. 1 kali per tahun	E. 0 kali per tahun

**Mohon Masukan/Saran Terkait Pelaksanaan Penanggulangan
Bencana Bidang Pendidikan.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses penunjukan/penugasan terhadap sekolah untuk menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan ?
2. Bagaimana bentuk sosialisasi penyelenggaraan penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
3. Siapa yang menjadi nara sumber dalam sosialisasi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
4. Bagaimana sarana prasarana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
5. Bagaimana sumber dana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
6. Bagaimana pemberian intensif terhadap sekolah atau pihak lain penyelenggara Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
7. Bagaimana penempatan staf dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?
8. Bagaimana bentuk kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan.
9. Apakah sekolah penyelenggara Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan menerima panduan atau pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Bidang Pendidikan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama : Winda Paramita
- Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 29 Mei 1976
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Alamat : Jalan Alle Raya III No. 39 Rempoa Ciputat,
Tangerang Selatan – Banten
- Telepon : 021-74714502
- Email : winda_sahal@yahoo.com
- Latar Belakang Pendidikan :
1. 1994 – 1999 : Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
 2. 1991 – 1994 : SMAN 74 Jakarta
 3. 1988 – 1991 : SMPN 87 Jakarta
 4. 1982 – 1988 : SDN Situ Gintung II Pagi, Tangerang
- Pengalaman Kerja :
1. 2005 – sekarang : Pegawai Negeri Sipil di Kemdikbud Jakarta
 2. 1999 – 2002 : Arsitek Desain Interior di PT. Intromulti Harmony